



## **BAB IV**

# **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

*Bab ini memuat laporan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2014. Laporan bab ini memberikan gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan realisasinya, serta permasalahan solusi penyelesaian masalah. Secara umum bab ini terdiri dari :*

1. *Urusan Wajib*
2. *Urusan Pilihan*

Pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator, fasilitator dan administrator dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan fungsi tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penentuan skala prioritas pengeluaran pemerintah melalui APBD dan APBN dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai stimulus ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan memberikan stimulus fiskal kepada masyarakat berarti masyarakat memperoleh penghasilan dari pekerjaan dan inflasi tetap terjaga serta konsumsi dalam negeri dapat didorong. Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut secara konkrit dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang terbagi dalam urusan Wajib dan Pilihan.

### **A. URUSAN WAJIB**

#### **1. Dinas Pendidikan**

Dinas Pendidikan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Oleh karenanya, fungsi pendidikan merupakan salah satu prioritas urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Selama Tahun 2014, Dinas Pendidikan melaksanakan 12 program dan 83 kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini.



**Tabel 4.1**  
**Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pendidikan**  
**Tahun Anggaran 2014**

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.057.408.607,80	2.537.554.968,00	83,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	207.590.000,00	164.565.849,00	79,27
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.200.000,00	18.576.000,00	96,75
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.489.100,00	41.375.000,00	75,93
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	83.320.000,00	83.005.680,00	99,62
Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.464.508.000,00	4.445.007.450,00	99,56
Program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan tahun	27.413.482.250,00	26.393.846.432,00	96,28
Program Pendidikan menengah	8.652.352.894,50	7.719.982.383,50	89,22
Program Pendidikan non Formal	1.133.330.000,00	1.110.800.431,00	98,01
Program Pendidikan luar biasa	232.750.000,00	232.590.000,00	99,93
Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	1.372.570.000,00	1.306.711.250,00	95,20
Program manajemen pelayanan pendidikan	1.090.041.550,00	1.040.988.350,00	95,50
<b>JUMLAH</b>	<b>47.781.042.402,30</b>	<b>45.095.003.793,50</b>	<b>94,38</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Program ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak 0-6 tahun tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi dan tahap perkembangannya serta sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka dibuatlah beberapa kegiatan diantaranya pembangunan sarana air bersih dan sanitasi; rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; penyelenggaraan pendidikan usia dini; penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD; serta publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini.

**b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Untuk mencapai tujuan dari Program Pendidikan Dasar 9 Tahun ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain : penambahan ruang kelas sekolah; pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir; pembangunan unit kesehatan sekolah; pembangunan perpustakaan sekolah; pembangunan sarana air bersih dan sanitary; pengadaan alat praktik dan peraga



siswa; pengadaan meubeleur sekolah; rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah; rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah; pelatihan penyusunan kurikulum kegiatan; penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP; penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS; penyelenggaraan paket A setara SD; penyelenggaraan paket B setara SMP; pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa; penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar; monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta pembinaan sekolah sehat/berwawasan.

**c. Program Pendidikan Menengah**

Dalam upaya untuk mencapai sasaran dari Program Pendidikan Menengah, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya : penambahan ruang kelas; pembangunan laboratorium dan ruang kelas praktikum sekolah (bahasa, komputer, IPA, APS da lain-lain);pembangunan perpustakaan sekolah; pembangunan perpustakaan sekolah; pembangunan sarana air bersih dan sanitary; pengadaan alat praktik dan peraga siswa; pengadaan meubeleur sekolah; rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah; pelatihan penyusunan kurikulum; penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)/pengganti komite; penyelenggaraan paket C setara SMU; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa; pembinaan perguruan tinggi; serta pembinaan sekolah/berwawasan lingkungan hidup.

**d. Program Pendidikan Non Formal**

Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan atau sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal. Program ini dilaksanakan juga untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai keterampilan yang dimiliki. Adapun untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pemberdayaan tenaga pendidik non formal; pemberian bantuan operasional pendidikan non formal; pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan; pengembangan pendidikan keaksaraan; pengembangan pendidikan dan kecakapan hidup; serta monitoring dan evaluasi.



**e. Program Pendidikan Luar Biasa**

Program Pendidikan Luar Biasa dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidik bagi anak yang memiliki kelemahan fisik dan mental. Untuk mencapai sasaran dari program ini, telah dilaksanakan kegiatan antara lain : pengadaan perlengkapan sekolah; pengadaan alat praktek dan peraga siswa; serta penyediaan makan minum siswa dan pengurus SDLB.

**f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Peningkatan Kualitas atau Mutu Pendidik sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dilaksanakanlah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya pelaksanaan sertifikasi pendidik; pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik;serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

Ilmu pengetahuan tidak hanya didapat dari proses belajar mengajar akan tetapi juga dapat diperoleh dari membaca buku-buku. Program ini bertujuan agar siswa lebih aktif dalam mencari pengetahuan melalui buku-buku baru yang berkualitas.

**h. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan; pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana bantuan; penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; penyusunan perencanaan dan program; serta EDS-Evaluasi Diri Sekolah.

Dari berbagai kombinasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2014 dapat terlihat adanya perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), sarana prasarana sekolah, tingkat kelulusan, melek huruf, Angka Partisipasi Sekolah, ratio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk kelompok usia tertentu serta ratio ketersediaan guru terhadap murid.



Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan. Pada umumnya nilai APM untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu lebih tinggi dibandingkan dengan APM tingkat Provinsi Jambi walaupun belum mencapai 100 persen. Proporsi terbesar terdapat pada jenjang pendidikan SD/MI, kemudian diikuti jenjang pendidikan SLTP/MTs dan jenjang pendidikan SLTA/MA. Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan penduduk yang dapat sekolah tepat pada waktunya atau usia (7-12).

**Tabel 4.2**  
Capaian APM dan APK  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2014

NO	Aspek Pendidikan	Tanjung-Tim	Tahun			
			2011	2012	2013	2014
I	<b>APM</b>					
1	SD/MI	Positif	96,95	96,97	97,06	97,07
2	SMP/MTs	Positif	78,25	78,45	78,74	90,38
3	SMA/SMK/MA	Positif	58,9	58,91	58,92	62,29
II	<b>APK</b>					
1	SD/MI	Positif	126,07	112	106,69	110,32
2	SMP/MTs	Positif	84,02	84,42	87,38	90,39
3	SMA/SMK/MA	Positif	64,09	65,86	69,34	84,48

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Jika dilihat pencapaian APM sampai dengan tahun 2014 yang mencapai 97,07 persen pada tingkat SD, dan 90,38 persen untuk tingkat SLTP sedangkan SMA/SMK



mencapai 62,29 persen, maka dapat dikatakan bahwa pencapai tersebut sudah memenuhi target pencapaian RPJMD 2011-2016.

Untuk Angka Melek Huruf mencapai 96,53 persen yang artinya bahwa masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk usia diatas 15 tahun keatas sebagian besar telah dapat membaca dan menulis, ini merupakan modal dasar bagi daerah untuk mentransformasi pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Masyarakat akan dapat membaca informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya masyarakat mampu menjadi subjek pembangunan dan memiliki peran untuk menentukan arah pembangunan yang diinginkan. Angka melek huruf disebelas kecamatan diatas 90 persen, angka melek huruf terendah di kecamatan Mendahara yaitu 93,27 persen sedang tertinggi di kecamatan Rantau Rasau yaitu 98,72 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Angka Melek Huruf**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2010-2014**

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis (orang)	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (orang)	Angka melek huruf (%)	Angka melek huruf
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	10.629	11.019	96,46	390
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	22.791	23.139	98,50	348
3	Kecamatan Mendahara	17.621	18.893	93,27	1.272
4	Kecamatan Mendahara Ulu	9.709	10.361	93,71	652
5	Kecamatan Geragai	15.093	15.529	97,19	436
6	Kecamatan Dendang	10.527	10.878	96,77	351
7	Kecamatan Kuala Jambi	9.843	10.188	96,61	345
8	Kecamatan Sadu	8.774	9.049	96,96	275
9	Kecamatan Nipah Panjang	17.905	18.716	95,67	811
10	Kecamatan Berbak	6.877	7.045	97,62	168
11	Kecamatan Rantau Rasau	16.700	16.916	98,72	216
<b>J U M L A H 2014</b>		146.469	151.733	96,53	5.264
<b>2013</b>		146.012	151.236	96,55	5.224
<b>2012</b>		143.824	149.787	96,02	5.963
<b>2011</b>		139.541	146.134	95,49	6.593
<b>2010</b>		137.816	145.129	94,96	7.313

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Pembebasan biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar di kabupaten yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 memberi dampak yang cukup bermakna, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase penduduk yang mengikuti dan menamatkan SD, SMP maupun SMA/SMK. Seperti yang terlihat pada tabel 4.4, tingkat kelulusan SD, SMP, maupun SMA/SMK tahun 2013-2014 selalu diatas 95 %.



**Tabel 4.4**  
Tingkat Kelulusan dan Jumlah Kelompok Belajar  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013-2014

No	Uraian	2013	2014
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Tingkat kelulusan</b>		
	SD	99,24%	99,87%
	SMP/MTs	96,51%	96,25%
	SMA/SMK/MA	98,55%	99,63%
<b>II</b>	<b>Jumlah Kelompok Belajar Masyarakat</b>	11	11

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Selain indikator tersebut, Dinas Pendidikan juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan hasil yang cukup signifikan seperti pada tabel 4.5 dibawah ini

**Tabel 4.5**  
Hasil Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2013-2014

No	Uraian	2013	2014
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>a. Ruang kelas yang direhabilitasi berat</b>		
	SD	289	339
	SMP	111	124
	SMA/SMK	12	13
	<b>b. Ruang kelas yang direhabilitasi sedang/ ringan</b>		
	SD	0	0
	SMP	0	0
	SMA/SMK	0	0
<b>II</b>	<b>Sekolah dengan fasilitas perpustakaan</b>		
	SD	94	94
	SMP	26	27
	SMA/SMK	10	10

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014 untuk penduduk 7 sampai dengan 12 tahun adalah 95,27 per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, sedangkan pada tahun yang sama untuk penduduk 13 sampai dengan 15 tahun adalah 66,97 per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun.





**Tabel 4.6**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014**  
**Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	2	3	4	5 = (3/4*10.000)	6	7	8 = (6/7*10.000)
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	15	1.895	79,16	4	820	48,78
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	27	3.344	80,74	13	1.570	82,80
3	Kecamatan Mendahara	27	2.803	96,33	9	1.315	68,44
4	Kecamatan Mendahara Ulu	10	1.755	56,98	7	1.253	55,87
5	Kecamatan Geragai	24	2.410	99,59	8	1.091	73,33
6	Kecamatan Dendang	18	1.781	101,07	5	816	61,27
7	Kecamatan Kuala Jambi	14	1.700	82,35	7	805	86,96
8	Kecamatan Sadu	19	1.281	148,32	5	628	79,62
9	Kecamatan Nipah Panjang	29	2.917	99,42	8	1.428	56,02
10	Kecamatan Berbak	14	1.747	80,14	5	428	116,82
11	Kecamatan Rantau Rasau	32	2.405	133,06	5	1.194	41,88
<b>JUMLAH</b>		229	24.038	95,27	76	11.348	66,97
<b>2013</b>		229	24.733	92,59	76	11.374	66,82
<b>2012</b>		230	24.362	94,41	76	11.444	66,41
<b>2011</b>		230	24.139	95,28	74	11.291	65,54
<b>2010</b>		230	24.069	95,56	74	11.212	66,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Dilihat dari tabel 4.6, jumlah gedung sekolah SD/MI terbanyak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak di Kecamatan Rantau Rasau yaitu 32 (tiga puluh) unit dan kecamatan Mendahara Ulu merupakan kecamatan yang memiliki gedung sekolah paling sedikit yaitu 10 (sepuluh) unit. Sedangkan jumlah gedung sekolah SMP/MTs terbanyak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak di kecamatan Muara Sabak Timur yaitu 13 (tiga belas) unit, dan paling sedikit di Kecamatan Muara Sabak Barat yaitu sebanyak 4 (empat) unit. Hal ini memperlihatkan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah tersebar di seluruh Kecamatan.

Rasio ketersediaan sekolah paling tinggi untuk SD/MI di kecamatan Sadu yaitu sebesar 148,32 per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun sedangkan untuk SMP/MTs di kecamatan Berbak yaitu sebesar 116,82 per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun. Sedangkan Rasio ketersediaan sekolah paling rendah untuk SD/MI di kecamatan Mendahara Ulu yaitu sebesar 56,98 per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun sedangkan untuk SMP/MTs di kecamatan Rantau Rasau yaitu sebesar 41,88 per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun.





**Tabel 4.7**  
**Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014**  
**Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

NO	Kecamatan	SD			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	5 = (3/4*1.000)	6	7	8 = (6/7*1.000)
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	141	2.312	60,99	40	793	50,44
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	186	3.594	51,75	62	1.577	39,32
3	Kecamatan Mendahara	109	3.224	33,81	29	617	47,00
4	Kecamatan Mendahara Ulu	70	2.306	30,36	38	1.220	31,15
5	Kecamatan Geragai	205	2.865	71,55	59	1.244	47,43
6	Kecamatan Dendang	121	1.814	66,70	43	743	57,87
7	Kecamatan Kuala Jambi	93	1.911	48,67	28	711	39,38
8	Kecamatan Sadu	73	1.604	45,51	22	541	40,67
9	Kecamatan Nipah Panjang	204	3.091	66,00	71	1.326	53,54
10	Kecamatan Berbak	65	1.247	52,13	23	617	37,28
11	Kecamatan Rantau Rasau	251	2.601	96,50	47	1.380	34,06
<b>JUMLAH</b>		<b>1.518</b>	<b>26.569</b>	<b>57,13</b>	<b>462</b>	<b>10.769</b>	<b>42,90</b>
<b>2013</b>		<b>1.518</b>	<b>23.676</b>	<b>64,12</b>	<b>462</b>	<b>7.166</b>	<b>64,47</b>
<b>2012</b>		<b>1.539</b>	<b>25.748</b>	<b>59,77</b>	<b>491</b>	<b>9.662</b>	<b>50,82</b>
<b>2011</b>		<b>1.605</b>	<b>27.037</b>	<b>59,36</b>	<b>491</b>	<b>9.584</b>	<b>51,23</b>
<b>2010</b>		<b>1.593</b>	<b>27.659</b>	<b>57,59</b>	<b>480</b>	<b>9.522</b>	<b>50,41</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar, rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Dilihat dari tabel 4.7 di atas, rasio guru terhadap murid tahun 2013-2014 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami trend negatif, yaitu dari rasio 64,12 per 1.000 murid SD/MI pada tahun 2013 menjadi 57,13 per 1.000 murid SD/MI pada tahun 2014, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs turun dari 64,47 per 1.000 murid SMP/MTs pada tahun 2013 menjadi 42,90 per 1.000 murid SMP/MTs pada tahun 2014. Hal ini dikarena meningkatnya keinginan masyarakat untuk bersekolah khususnya pada pendidikan dasar tidak dibarengi oleh penambahan guru.

Jumlah tenaga pengajar yang tersedia pada suatu sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu sekolah. Semakin besar angka rasio ini, angka mutu pendidikan diharapkan akan lebih baik, dibanding sekolah yang mempunyai tenaga pengajar yang sedikit. Rasio tertinggi pada jenjang SD/MI tahun 2014 terdapat di kecamatan Rantau Rasau yaitu sebesar 196,50 per 1.000 murid SD/MI dan terendah di kecamatan Mendahara Ulu yaitu sebesar 30,36 per 1.000 murid SD/MI. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs dengan tahun yang sama, rasio tertinggi terdapat pada kecamatan Dendang yaitu sebesar



57,87 per 1.000 murid SMP/MTs dan terendah di kecamatan Ratau Rasau yaitu masing-masing sebesar 34,06 per 1.000 murid SMP/MTs.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihadapi selama tahun 2014 antarlainsebagai berikut :

1. Masih terdapat Guru TK, SD, SMP, dan SMA/SMK yang belum berkualifikasi pendidikan belum S1.
2. Masih terdapat Guru TK, SD, SMP, dan SMA/SMK yang belum sertifikasi.
3. Masih ditemukan kekurangan sarana prasarana belajar siswa, diantaranya :
  - a. Perpustakaan SD sebanyak 149 sekolah
  - b. Perpustakaan SMP sebanyak 16 sekolah
  - c. Perpustakaan SMA sebanyak 6 sekolah
  - d. Perpustakaan SMK sebanyak 5 sekolah
  - e. Lab IPA untuk SMA sebanyak 25 sekolah
  - f. Lab Fisika SMA sebanyak 6 sekolah
  - g. Lab Biologi SMA sebanyak 8 sekolah
  - h. Lab Kimia SMA sebanyak 8 sekolah
  - i. Lab Komputer sebanyak 8 sekolah
  - j. Lab Multimedia sebanyak 9 sekolah
  - k. Alat Praktek Kimia SMA sebanyak 8 sekolah
  - l. Alat Praktek Biologi sebanyak 8 sekolah
  - m. Alat Praktek IPA SMK sebanyak 6 sekolah
  - n. Ruang Praktek SMK Kelautan Perikanan sebanyak 1 sekolah
  - o. Ruang Praktek SMK Tata Boga sebanyak 1 sekolah
  - p. Ruang Praktek SMK Pertanian sebanyak 1 sekolah
  - q. Alat Praktek SMK Otomotif sebanyak 1 sekolah
  - r. Buku Pokok Siswa untuk 7 sekolah (807 siswa)
  - s. Komputer untuk belajar siswa sebanyak 293 unit
4. Masih terdapat ruang belajar yang rusak :
  - a. SD sebanyak 521 ruang
  - b. SMP sebanyak 78 ruang
  - c. SMA sebanyak 15 ruang
  - d. SMK sebanyak 6 ruang
5. Persentase kelulusan siswa SMP, SMA, dan SMK belum mencapai 100%
6. Masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi sebanyak 147 sekolah.
7. Belum semua cabang olimpia desain dapat bersaing secara nasional dan internasional.



8. Sebagian besar guru tidak berminat melakukan penelitian tindakan kelas.
9. Semua sekolah belum membuat rencana kerja jangka menengah (4 tahunan) seperti di tuangkan pada Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang standar pengolahan.
10. Belum semua sekolah mampu melaksanakan proses belajar dan penelitian hasil belajar seperti yang dituangkan pada permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian.
11. Belum semua guru pada sekolah mampu menoperasikan komputer.
12. Belum terpenuhi standar pembiayaan untuk penyelenggaraan/pengelolaan sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masih ditemukan siswa mengulang, putus sekolah walaupun persentasenya kecil.
13. Belum tersedianya kartu belajar berdasarkan nomor induk siswa nasional sesuai dengan format Departemen Pendidikan Nasional.
14. Belum mencukupinya anggaran melalui APBD-2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk petugas operator jaringan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Depdiknas nomor 38 tahun 2008, tentang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Depdiknas.
15. Masih terdapat guru yang tidak menguasai standar profesionalisme.
16. Masih ada komite sekolah yang belum menerima sosialisasi tentang peran dan fungsi komite sekolah sesuai dengan Permendiknas No.44 tahun 2003.

Dari berbagai permasalahan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang diambil dan dilaksanakan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang strategis yang berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa baik yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat, provinsi maupun kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pendanaan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan dana yang bersumber dari dana dekonsentrasi APBD I, APBD II, maupun dari Pemerintah Pusat (APBN).



## 2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Kesehatan melaksanakan 20 program dan 101 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kesehatan tertera dalam tabel 4.8 dibawah ini.

**Tabel 4.8**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.420.259.150,00	1.370.562.598,00	96,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	632.130.000,00	596.204.000,00	94,32
Program Peningkatan disiplin Aparatur	27.050.000,00	24.550.000,00	90,76
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	191.392.500,00	190.160.100,00	99,36
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.729.025.200,00	2.635.191.770,00	96,56
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.145.914.800,00	4.771.549.726,00	92,73
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	230.263.500,00	225.994.915,00	98,15
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	277.035.500,00	264.823.070,00	95,59
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	152.665.000,00	148.050.000,00	96,98
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	751.095.000,00	699.928.860,00	93,19
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	264.915.000,00	247.315.000,00	93,36
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	5.369.567.650,00	5.253.676.840,00	97,84



Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan balita	67.485.000,00	64.785.000,00	96,00
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	46.645.000,00	45.995.000,00	98,61
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	267.695.000,00	264.845.000,00	98,94
Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	568.628.000,00	564.802.100,00	99,33
Program pengembangan kesehatan	22.639.000,00	22.639.000,00	99,88
Program perizinan praktek kesehatan	9.800.000,00	9.650.000,00	98,47
program jaminan kesehatan nasional	3.921.576.000,00	2.727.033.969,00	69,54
<b>JUMLAH</b>	<b>22.113.781.300,00</b>	<b>20.145.756.948,00</b>	<b>91,10</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur

#### a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dibuat beberapa kegiatan diantaranya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; pemantauan ketersediaan obat; peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat-batan, pemusnahan obat di puskesmas; harmonisasi pengadaan dan penggunaan obat program dan PKD; manajemen Kefarmasian di Puskesmas.

#### b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka dibuatlah beberapa kegiatan diantaranya Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan; penyediaan biaya Operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik; penyediaan dan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Lambur; Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut; penyediaan Biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Dendang; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau; penyediaan biaya



operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Mendahara; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut; Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah(UKS); penyediaan biaya operasional instalasi farmasi; serta pemilihan tenaga kesehatan teladan.

**c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain : pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat; penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; pengembangan desa siaga; serta peningkatan penjangkaran kesehatan siswa SD/MI.

**d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain : pemberian tambahan makanan dan vitamin; Penanggulangan kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitain A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya; pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi; serta Pekan Penimbangan Tingkat Kabupaten.

**e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**

Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka dibuatlah beberapa kegiatan diantaranya penyuluhan menciptakan lingkungan sehat; pengawasan kualitas air minum; serta Pertemuan Kader Kesling.

**f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta, TB, HIV/AIDS, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat



dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus, dan neoplasma. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah : pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah; pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik serta peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

**g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat penduduk miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini berupa pelayanan operasi katarak; pelayanan operasi bibir sumbing; pelayanan pengobatan dokter spesialis bedah dan obgen di puskesmas; serta pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil (DPTK).

**h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**

Program ini ditujukan guna lebih meningkatkan fasilitas pelayan masyarakat di desa yang ditunjang dengan kegiatan berupa pembangunan puskesmas dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.

**i. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemitraan dalam pelayanan kesehatan yang bersifat medis dan kearifan lokal. Kegiatan yang mendukung program ini ialah kemitraan bidan-dukun.

**j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus bagi lanjut usia dan balita, adapun kegiatan yang dibuat dalam mencapai sasaran berupa pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia dan balita.

**k. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan**

Program ini bertujuan untuk menjamin kesehatan makanan dan minuman hasil produksi rumah tangga serta obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini berupa Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga.

**l. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**





Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka dibuatlah beberapa kegiatan berupa pertemuan audit maternal (AMP) perinatal; pelatihan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK); sosialisasi pelayanan kesehatan peduli remaja; Pelatihan Kelas Ibu Balita dan Ibu Hamil; Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Cluster 4; serta Pelatihan Manajemen PWS KIA Bagi Bidan Desa.

**m. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan**

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Adapun kegiatan pokok dari program ini antara lain : peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan; peningkatan perencanaan puskesmas; pemutakhiran data kesehatan kabupaten; peningkatan monitoring dan evaluasi kesehatan terpadu serta peningkatan sistem informasi kesehatan.

**n. Program Pengembangan Kesehatan**

Program ini bertujuan untuk lebih memperluas jangkauan pola hidup sehat yang ada di masyarakat, adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu Asuhan Keperawatan pada Keluarga dan Kelompok Masyarakat dan Peningkatan Manajemen Puskesmas.

**o. Program Perizinan Praktek Kesehatan**

Program ini bertujuan untuk lebih menjamin kualitas pelayanan dari izin praktek dokter yang diberikan, adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu Peningkatan pembinaan dan pengawasan izin praktek Kesehatan.

**p. Program Jaminan Kesehatan Nasional**

Program ini merupakan upaya pemerintah dalam menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat kepastian dalam fasilitas kesehatan, adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Barat; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Pandan; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Timur; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simur



Naik; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Berbak; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan; Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Jambat; serta Penyediaan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pada Dinas Kesehatan sehingga ada beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana sepenuhnya.
- 2) Masih lemahnya administrasi terutama pada pencatatan dan pelaporan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
- 3) Masih kurangnya tenaga dokter gigi dan dokter umum untuk setiap puskesmas, terutama puskesmas terpencil, sehingga pelayanan yang bermutu yang diterima oleh masyarakat masih belum maksimal.
- 4) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan terutama PHBS.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Telah dilaksanakan perekrutan tenaga, melaksanakan pendidikan lanjutan bagi pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan.
- 2) Melakukan bimbingan teknis bagi tenaga administrasi dan program baik di lingkungan Dinas Kesehatan maupun jajaran dibawahnya (Puskesmas).
- 3) Berkoordinasi dengan BKD untuk penempatan tenaga dokter umum, dokter gigi PTT menjadi PNS daerah melalui formasi CPNSD 2014/2015.
- 4) Melaksanakan penyuluhan secara continue, baik secara langsung maupun melalui media informasi.



Hasil dari berbagai kegiatan pembangunan kesehatan 2014 tercermin dari pencapaian target dari beberapa indikator pada sasaran status kesehatan dan status gizi masyarakat dan keluarga sadar gizi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.9**  
Perkembangan Sektor Kesehatan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2014

NO	URAIAN	Target 2014	Capaian 2014
1	Angka harapan hidup	72,04 tahun	71,20 tahun
2	Angka Kematian Bayi	24,02/1.000 KH	20,43/1.000 KH
3	Angka Kematian neonatal	19,68/1.000 KH	22,53/1.000 KH
4	Angka Kematian balita	44,00/1.000 KH	25,67/1.000 KH
5	Jumlah kematian ibu	9 org	5 org
6	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,00%	92,58%
7	Indeks Pembangunan Manusia	73,10%	72,10%
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	71,00%	88,28%
9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	75,00%	75,00%
10	Cakupan pelayanan nifas	85,00%	95,71%
11	Cakupan kunjungan bayi	91,00%	95,60%
12	Cakupan kunjungan K4	90,00%	93,18%
13	Persentase balita gizi buruk	0,2%	0,02%
14	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%
15	Persentase balita gizi kurang	17%	0,9%
16	Prevelensi anak-anak dibawah berat badan normal	0,40%	0,50%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan uraian diatas dan sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur optimis dapat mencapai target MDG's (tujuan pembangunan millenium) pada tahun 2015, karena program yang dilaksanakan selama ini sudah dalam jalur yang tepat, dan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan.

### 3. RSUD Nurdin Hamzah

RSUD Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RSUD Nurdin Hamzah mempunyai fungsi :



1. Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum;
2. Pengkoordinasian Rumah Sakit Umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, RSUD Nurdin Hamzah melaksanakan 10 program dan 35 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja RSUD Nurdin Hamzah tertera dalam tabel 4.10 dibawah ini.

**Tabel 4.10**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.912.974.000,00	3.839.731.079,00	98,13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	777.745.000,00	728.517.950,00	93,67
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	247.928.750,00	227.001.740,00	91,56
Program obat dan perbekalan kesehatan	11.512.000,00	11.512.000,00	100,00
program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	231.000.000,00	155.011.200,00	67,10
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	3.629.386.450,00	3.490.096.290,00	96,16
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	469.185.000,00	455.870.000,00	97,16
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	276.400.000,00	262.800.000,00	95,08
Program peningkatan sistem informasi kesehatan	164.030.000,00	162.756.900,00	99,22
<b>JUMLAH</b>	<b>9.728.561.200,00</b>	<b>9.341.697.159,00</b>	<b>96,02</b>

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah

**a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**

Dalam upaya lebih menjamin mutu obat dan perbekalan kesehatan maka dibuat program ini dengan kegiatan pendukung peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.



**b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Program ini ditujukan sebagai upaya meningkatkan pola hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk pembelajaran tersebut dilaksanakan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

**c. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**

Dalam upaya mencapai standarisasi pelayanan kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah melaksanakan kegiatan berupa penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan.

**d. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kegiatan berupa Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit; pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit; pengadaan obat-obatan rumah sakit; pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain); pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit; serta pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit.

**e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata**

Program ini bertujuan untuk menjaga atau memelihara aset rumah sakit, adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung antara lain : pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit; pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit; serta pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit.

**f. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Kegiatan pokoknya berupa Kegiatan kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan.

**g. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan**

Program ini bertujuan untuk melaksanakan strategi manajemen guna upaya peningkatan pelayanan rumah sakit, adapun program ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan; pemuktakhiran data kesehatan kabupaten; peningkatan monitoring dan evaluasi kesehatan terpadu; serta peningkatan perencanaan rumah sakit.



Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh RSUD Nurdin Hamzah dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), seperti kurangnya tenaga dokter umum dan tenaga dokter spesialis yang tidak menetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari tim pelaksana akreditasi (tim penyusun standar pelayanan kesehatan / dokumen-dokumen akreditasi) sehingga belum terlaksana sesuai target.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan dokter spesialis semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peralatan kesehatan yang ada.
- 2) Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit yang sudah terakreditasi
- 3) Pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman.

Berikut digambarkan kinerja dan perkembangan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2010-2014 pada tabel 4.11 dibawah ini :

**Tabel 4.11**  
Perkembangan Pelayanan pada RSUD  
Tahun 2010-2014

URAIAN	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Bed Occupation Rate (%)	17,7	16,37	25,53	28,08	31,98
Average Length of Stay (Hari)	3	3	3	3	2
Bed Turn Over (Kali)	31	31	35	36	33
Turn Over Interval (Hari)	9	10	7	7	6
Net Death Rate (%)	1,5	1	1,63	0,73	0,22
Gross Death Rate (%)	0,015	1,27	1,4	2,15	1,47
Jumlah Tempat Tidur (Unit)	41	45	43	44	45
Jumlah Kematian (Jiwa)	20	18	23	35	26
Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa)	8.811	9.167	10.575	12.469	11.833
Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa)	1.078	1.580	1.589	1.771	1.811

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah

#### 4. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun



2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 13 program dan 37 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pekerjaan Umum tertera dalam tabel 4.12 dibawah ini.

**Tabel 4.12**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.283.100.000,00	1.105.930.514,00	86,19
Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur	9.603.607.871,00	5.583.134.816,00	58,14
Program peningkatan Disiplin Aparatur	39.500.000,00	37.750.000,00	95,57
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000,00	87.100.000,00	96,78
program peningkatan kebijakan dan manajemen	64.000.000,00	61.858.525,00	96,65
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	162.088.874.310,00	159.877.326.555,00	98,64
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.877.000.000,00	3.704.343.000,00	95,55
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	300.000.000,00	298.277.860,00	99,43
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	26.597.343.000,00	25.799.285.550,00	97,00
Program penyediaan dan pengelolaan air baku	2.264.900.000,00	2.260.449.200,00	99,80
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	24.656.249.300,00	23.863.837.918,00	96,79
program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	166.560.000,00	69.593.400,00	41,78
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	33.054.487.966,00	31.811.023.263,00	96,24
<b>JUMLAH</b>	<b>264.085.622.447,00</b>	<b>254.559.910.601,00</b>	<b>96,39</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur





**a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas jalan melalui kegiatan pokok antara lain perencanaan pembangunan jalan; pembangunan jalan; perencanaan pembangunan jembatan; dan pembangunan jembatan.

**b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong**

Program ini dimaksudkan untuk membangun saluran drainase dan gorong-gorong guna meningkatkan daya tampung limpahan air permukaan dan mengurangi kawasan genangan air dengan kegiatan pokok berupa pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**

Inti dari program ini yaitu rehabilitasi/pemeliharaan alat berat berupa ekskavator yang beroperasi di kecamatan guna mendukung pembangunan wilayah pedesaan.

**d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**

Program ini mempunyai beberapa kegiatan diantaranya perencanaan pembangunan jaringan irigasi; rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi; dan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun.

**e. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku**

Untuk mencapai sasaran pokok dari program ini maka dibuatlah kegiatan berupa pembangunan sumur-sumur air tanah.

**f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

kegiatan pokok sebagai penunjang program ini berupa penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta operasional UPTD sistem penyediaan air minum.

**g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Program ini bertujuan untuk pengembangan wilayah, untuk mendukung tujuan dari program ini dilaksanakan kegiatan percepatan sanitasi pemukiman di daerah dan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

**h. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan kegiatan berupa pembangunan jalan dan jembatan pedesaan.



Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 antara lain :

- 1) Pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian besar wilayahnya berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi dalam pembangunannya memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah.
- 2) Penyebaran pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur langsung pedesaan atau lingkungan menjadi sedikit terhambat.
- 3) Kurangnya sumber galian C di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyebabkan volume material perkerasan badan jalan memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaannya.
- 4) Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil, maka setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diikuti pula dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek.
- 5) Areal pemukiman penduduk yang padat pada beberapa lokasi yang menyebabkan sulitnya pengembangan jalan lingkungan pedesaan.
- 6) Program pengembangan jalan lingkungan pemukiman perdesaan yang memerlukan biaya tinggi, dikarenakan kontruksi yang digunakan merupakan struktur tiang beton bertulang.
- 7) Kondisi geografis kabupaten tanjung jabung timur yang merupakan daerah dataran rendah sangat tidak memungkinkan untuk mensuplai air minum menggunakan sistem gravitasi sehingga dibutuhkan biaya/cost yang tinggi dalam hal pengadaan infrastruktur air minum maupun operasionalnya. Hal ini disebabkan karena masih dibutuhkannya sistem pompanisasi dalam mendistribusikan air minum ke masyarakat.
- 8) Penyebaran penduduk yang tidak merata, hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan jaringan pipanisasi air minum karena untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah yang jauh dari ibukota kecamatan dan desa maka diperlukan pipa yang sangat panjang, hal ini kurang memungkinkan karena akan menambah biaya operasional dan juga akan mengurangi debit dari suplay air minum itu sendiri yang berakibat pada kuantitas dan kualitas air minum yang diterima oleh masyarakat kurang baik dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi dalam pengolahannya.



- 9) Sumber air baku/intake di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat terbatas, hal ini diakibatkan oleh kondisi topografis daerah yang berada di kawasan pesisir pantai sehingga sumber air baku masih banyak dipengaruhi oleh air asin dan kadar Fe yang tinggi sehingga akan berakibat kurang baik terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kita.
- 10) Kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga dan merawat instalasi dan Infrastruktur Air minum yang telah terbangun.
- 11) Adanya klaim oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tentang kebun masyarakat yang termasuk dalam kawasan cagar alam.
- 12) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sehingga masih banyaknya masyarakat yang melakukan Mandi, Cuci dan Buang Air Besar yang tidak pada tempatnya.
- 13) Karena masyarakat banyak tinggal di tepi daerah aliran sungai maka seringkali ditemui masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke sungai, hal ini menjadi kebiasaan buruk masyarakat karena masih kurangnya sosialisasi dan Tempat pembuangan sampah yang jumlahnya masih sangat minim.
- 14) Sistem drainase yang belum ada yang dapat berakibat pada masih adanya di beberapa tempat yang menjadi daerah-daerah genangan air terutama air hujan, hal ini sangat berbahaya sekali karena dapat mengakibatkan banjir pada suatu wilayah.

Solusi dari berbagai permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014 :

- 1) Membuat jalur alternative dalam pembangunan lingkungan perdesaan untuk mengupayakan ketersediaan material pembangunan di lokasi kegiatan.
- 2) Meningkatkan pembangunan jalan dengan menggunakan Rigid Pavement sehingga jalan dapat mendukung beban/kendaraan yang lewat sesuai dengan klas/tonnase jalan sehingga jalan dapat berfungsi dengan baik.
- 3) Semaksimal mungkin untuk secepatnya membangun sarana prasarana penghubung untuk meminimalkan biaya pengangkutan material perkerasan ke lokasi pembangunan.
- 4) Melaksanakan anggaran untuk pembangunan jembatan dengan konstruksi beton, sehingga Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lainnya.



- 5) Dapat meyakinkan masyarakat untuk menyerahkan lahan agar pengembangan jalan lingkungan dapat dilaksanakan.
- 6) Meminimalkan penggunaan material pembangunan dengan metodologi perhitungan struktur beton bertulang yang tepat guna sehingga menyebabkan desain yang kuat, efektif dan efisien.
- 7) Untuk mensiasati biaya yang sangat tinggi dalam pengoperasian Instalasi air minum maka Dinas Pekerjaan Umum mulai mendata dan meng upgrade ulang instalasi-instalasi yang sudah terbangun dan telah berjalan yang semula memakai sistem pompanisasi dengan menggunakan tenaga Genset menjadi sistem pompanisasi dengan menggunakan energi tenaga listrik, karena dengan meng up grade ke energi listrik akan dapat menghemat biaya operasional sampai dengan separuhnya dan akan berdampak baik terhadap nilai subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
- 8) Dalam rangka mengatasi suplai air minum terhadap penyebaran penduduk yang tidak merata maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan umum mulai mendata Desa-desa dan kelurahan yang rawan terhadap air minum, hal ini dilakukan terutama terhadap desa-desa yang jauh dari Ibukota kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mendata daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan sumur-sumur baru di luar jangkauan pipa air minum. Dengan membangun sumur-sumur bor baru di beberapa titik di Kabupaten tanjung jabung timur maka akan dapat diharapkan pemerataan dalam hal masyarakat yang mendapatkan air bersih dan air minum yang berkualitas sehingga target pencapaian MDGs bidang air minum dapat tercapai.
- 9) Untuk mendapatkan sumber-sumber air baku yang baru di kabupaten tanjung jabung timur tidaklah mudah, maka untuk itu Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum akan menginventarisasi kembali sumber-sumber air baku yang baru dengan mengajak kerjasama tim ahli yang terkait termasuk tim dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi jambi dan Kementerian Pekerjaan umum.
- 10) Untuk menyadarkan masyarakat dalam hal pentingnya menjaga instalasi air minum yang telah terbangun maka dilakukan sosialisasi secara tidak langsung terhadap masyarakat pengguna dan pemakai air minum yang telah di bangun.
- 11) Melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan umum dan juga kegiatan PKK dan lain sebagainya, hal ini dilakukan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai akan pentingnya sanitasi dan dampak-dampak buruk yang di akibatkan oleh sanitasi yang buruk.



- 12) Kebiasaan membuang sampah ke sungai akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi ekosistem yang ada di sungai, untuk mengatasi hal ini maka pemerintah mengadakan sosialisasi dan membuat tempat pembuangan sampah di beberapa tempat untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada di lingkungan masyarakat.
- 13) Untuk mengatasi sistem drainase yang buruk maka Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membuat Master Plan pembangunan Sistem drainase yang ada di kabupaten tanjung jabung timur dalam rangka mengatasi daerah-daerah genangan air dan antisipasi banjir sampai dengan tahun-tahun kedepan
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebelum memulai pekerjaan sehingga tidak terjadi klem terhadap pembangunan dalam kawasan cagar alam.

Sarana prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam menunjang perekonomian masyarakat sekaligus peluang untuk meningkatkan investasi baik itu investasi ekonomi maupun sosial. Ketersediaan sarana jaringan transportasi yang menghubungkan seluruh sumber perekonomian masyarakat akan meningkatkan perputaran barang dan jasa antar daerah, kondisi jalan yang baik akan mengurangi biaya operasional bagi para pelaku usaha. Kesemuanya itu pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Perkembangan jaringan transportasi yang menghubungkan antara ibukota Provinsi Jambi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan jaringan transportasi dalam kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terlihat dalam tabel 4.13 dibawah ini :

**Tabel 4.13**  
Perkembangan Jalan Kabupaten Tahun 2011-2014

NO	URAIAN / KONDISI	2011		2012		2013		2014	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
<b>I</b>	<b>JENIS PERMUKAAN</b>								
a	Diaspal	154,64	16,44	96,15	10,06	148,74	15,23	195,96	19,79
b	Kerikil	209,37	22,26	343,85	35,99	356,91	36,55	362,58	36,62
c	Tanah	576,54	61,3	515,40	53,95	470,90	48,22	431,54	43,59
d	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH I</b>	<b>940,55</b>	<b>100</b>	<b>955,40</b>	<b>100,00</b>	<b>976,55</b>	<b>100,00</b>	<b>990,08</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>KONDISI JALAN</b>								
a	Baik	210,97	22,43	254,63	26,65	307,22	31,46	407,33	41,14



b	Sedang	344,1	36,58	374,42	39,19	387,48	39,68	340,20	34,36
c	Rusak	283,51	30,14	235,87	24,69	170,22	17,43	167,06	16,87
d	Rusak berat	101,97	10,84	90,48	9,47	111,63	11,43	75,49	7,62
<b>JUMLAH II</b>		<b>940,55</b>	<b>100</b>	<b>955,40</b>	<b>100,00</b>	<b>976,55</b>	<b>100,00</b>	<b>990,08</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>PERMUKAAN JALAN</b>								
a	ASPAL	-	-	96,15	10,06	148,74	15,23	195,96	19,79
b	KELAS B	-	-	343,85	35,99	356,91	36,55	362,58	36,62
c	LAINNYA	-	-	515,4	53,95	470,9	48,22	431,54	43,59
<b>JUMLAH III</b>		<b>940,55</b>	<b>100</b>	<b>955,40</b>	<b>100,00</b>	<b>976,55</b>	<b>100,00</b>	<b>990,08</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur

Perkembangan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dari 909,15 Km pada Tahun 2010 meningkat menjadi 990,08 Km pada Tahun 2014 total jalan yang telah dibangun dan ditingkatkan konstruksinya sehingga dapat dilewati kendaraan roda empat.

Sektor infrastruktur ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas keinfrastrukturan, baik jalan, jembatan, tanggul, maupun air bersih. Berikut hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

**Tabel 4.14**  
Perkemangan Sarana dan Prasarana Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	Pembangunan jembatan besi	22 unit	15 unit	17 unit	22 unit
2	Rehabilitasi irigrasi	77.820 M'	43.500 M'	37.940 M'	25.100 M'
3	Pembangunan tanggul	122.930 M'	96.500 M'	129.584 M'	111.200 M'
4	Pembangunan jalan baru	-	14,85 Km	21.150 Km	13.535 Km
5	Peningkatan jalan	-	94,83 Km	118,24 Km	89,43 Km
6	Pembangunan Box Culvert	22 unit	52 unit	25 unit	27 unit
7	Penyediaan air bersih (sumur pompa tangan)	-	42 unit	22 unit	55 unit
8	Cakupan air bersih	-	5,60%	15,75%	20,00%
9	Jalan jerambah beton	-	-	4.489 M	4.729 M
10	Jalan rabat beton	-	-	10.526 M	14.632,5 M
11	Jalan lingkungan	-	-	1.530 M	1.190 M

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur

## 5. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan



Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Tatakota dan Kebersihan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Tatakota dan Kebersihan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tatakota dan Kebersihan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan 10 program dan 26 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan tertera dalam tabel 4.15 dibawah ini.

**Tabel 4.15**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Tata Kota  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.828.597.800,00	2.735.280.575,00	96,70
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.065.157.200,00	1.052.691.050,00	98,83
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	166.797.200,00	166.000.000,00	99,52
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.000.000,00	11.293.000,00	94,11
program peningkatan kebijakan dan manajemen	84.300.000,00	55.910.300,00	66,32
Program perencanaan tata ruang	43.500.000,00	27.626.000,00	63,51
Program Pemanfaatan Ruang	3.227.112.500,00	3.149.340.950,00	97,59
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	815.755.500,00	571.817.000,00	70,10
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	647.180.000,00	538.274.280,00	83,17
<b>JUMLAH</b>	<b>8.940.400.200,00</b>	<b>8.358.233.155,00</b>	<b>93,49</b>

**a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**





Program ini bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di seluruh wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

**b. Program Perencanaan Tata Ruang**

Program ini ditunjang dengan 2 (dua) kegiatan diantaranya penyusunan rencana tata ruang wilayah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**c. Program Pemanfaatan Ruang**

Program ini ditunjang dengan 3 (tiga) kegiatan diantaranya Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; penyediaan sarana dan prasarana pertamanan; pemasangan lampu jalan, taman dan hutan kota; serta pemeliharaan rutin/berkala lampu.

**d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Program pengendalian dan pemanfaatan ruang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang melalui beberapa kegiatan diantaranya penyediaan sarana dan prasarana persampahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) baik kuantitas maupun kualitas sehingga sangat mempengaruhi operasional kinerja pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan.
- 2) Sarana dan Prasarana kantor, operasional kendaraan, maupun peralatan pemadam kebakaran dan kebersihan yang terbatas.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu penambahan jumlah Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang berkualitas di Bidang masing – masing Kegiatan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan agar kinerja lebih baik di tahun selanjutnya.
- 2) Penambahan Anggaran dalam menunjang ketersediaan sarana dan prasarana baik prasarana kantor maupun bidang penataan kota, bidang penanggulangan kebakaran serta bidang kebersihan dan pengelolaan pasar.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana Gedung Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan, guna kelancaran operasional kegiatan interen Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 15 program dan 55 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertera dalam tabel 4.16 dibawah ini.

**Tabel 4.16**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Perencanaan Tata Ruang	211.650.000,00	209.605.128,00	99,03
Program Pemanfaatan ruang	377.875.000,00	375.595.000,00	99,40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	942.812.500,00	900.003.792,00	95,46
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	468.613.900,00	411.678.349,00	87,85
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.700.000,00	15.500.000,00	87,57
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.000.000,00	2.000.000,00	22,22
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.260.000,00	44.211.000,00	99,89
Program Pengembangan Data / Informasi	591.138.000,00	526.459.200,00	89,06
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	115.865.000,00	111.145.000,00	95,93
Program Perencanaan Pembangunan daerah	1.044.182.040,00	1.018.999.130,00	97,59
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	843.798.500,00	801.869.440,00	95,03
Program perencanaan Sosial dan Budaya	816.379.960,00	794.795.800,00	97,36
program perencanaan prasarana	653.648.000,00	646.919.260,00	98,97



wilayah dan sumber daya alam dan lh			
Program peningkatan promosi dan kerjasama daerah	112.007.500,00	111.450.600,00	99,50
Program pengembangan E-Gov	1.074.326.400,00	1.014.220.878,00	94,41
<b>JUMLAH</b>	<b>7.323.256.800,00</b>	<b>6.984.452.577,00</b>	<b>95,37</b>

Sumber : Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Perencanaan Tata Ruang**

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan tata ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur disesuaikan dengan keinginan dan dinamika kehidupan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah koordinasi tentang rencana tata ruang; serta Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur.

**b. Program Pemanfaatan Ruang**

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang. kegiatan pokoknya berupa Inventarisasi dan Digitalisasi Sarana Infrastruktur Wilayah (Jalan, Jembatan dan Dermaga) di 6 (enam) Kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Timur.

**c. Program Pengembangan Data/Informasi**

Program ini bertujuan untuk pengumpulan data, dan updating data untuk dokumen perencanaan pembangunan, profile daerah, serta proyeksi analisa ekonomi makro dan analisa lainnya dengan kegiatan berupa penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan; dan pengumpulan updating dan analisa data dan informasi.

**d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Program ini bertujuan untuk pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan kegiatan berupa monitoring, evaluasi bidang infrastruktur wilayah; serta koordinasi, monitoring dan evaluasi bedah rumah SAMUDRA.

**e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan yang akan ditampung pemerintah daerah untuk masa yang akan datang, seperti : RPJP, RPJM, Renstra, RPKD, Renja, KUA, PPAS, dengan kegiatan berupa pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik; penyelenggaraan Musrenbang RPKD; koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah; koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ); monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan; Aplikasi



Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; serta Koordinasi Penyusunan dan Informasi Pembangunan Daerah.

**f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Program ini bertujuan untuk merencanakan dan mengukur pembangunan dibidang ekonomi, adapun kegiatan-kegiatannya antara lain : koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi; monitoring, evaluasi dan pelaporan; penyusunan publikasi susenas; penyusunan Nilai Tukar Petani; Penyusunan Masterplan Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN); Penyusunan Masterplan Pengembangan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

**g. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

Program ini bertujuan untuk perencanaan dan pengembangan bidang sosial dan budaya, adapun kegiatan yang mendukung program ini antara lain : koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; monitoring, evaluasi dan pelaporan; sistem informasi dan digitalisasi pembangunan daerah sektor pendidikan; Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD); koordinasi, monitoring dan evaluasi program SAMISAKE; Rencana Aksi Daerah (RAD) MDG'S serta sistem informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN).

**h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**

Program ini bertujuan untuk koordinasi penyusunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kegiatan pokok dari program ini berupa percepatan Pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP); Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pengadaan Citra Satelit Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**i. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah**

Adapun kegiatan dari program peningkatan promosi dan kerjasama daerah diantaranya berupa koordinasi perencanaan dan pembangunan penanaman modal.

**j. Program Pengembangan E-Government**

Inti dari program ini guna pengembangan sistem e-government yang telah ada di kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun kegiatan tersebut berupa pengembangan dan pemeliharaan jaringan E-Goverment; dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi.



Secara umum tidak ada permasalahan mendasar yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi di masa mendatang dalam melaksanakan tugas yang diemban khususnya di bidang perencanaan :

- 1). Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- 2). Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.
- 3). Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkesinambungan.
- 4). Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas.
- 5). Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat.
- 6). Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **7. Kantor Penelitian Pengembangan Daerah**

Kantor Penelitian Pengembangan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pada Tahun 2014, Kantor Penelitian Pengembangan Daerah melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Penelitian Pengembangan Daerah tertera dalam tabel 4.17 dibawah ini.

**Tabel 4.17**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	402.975.000,00	396.876.600,00	98,49
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.100.000,00	63.833.000,00	98,05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00	29.300.000,00	73,25
Program penelitian dan pengembangan	504.250.000,00	499.152.000,00	98,99
Program kelembagaan dan kelaksanaan	89.600.000,00	49.965.600,00	55,77
<b>JUMLAH</b>	<b>1.108.125.000,00</b>	<b>1.045.327.200,00</b>	<b>94,33</b>

Sumber : Kantor Litbangda Kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Penelitian/Pengembangan**

Kegiatan yang telah dijalankan dari program Penelitian/pengembangan meliputi kajian dampak Sosial Budaya Kebijakan Bidang Perijinan; Kajian Optimalisasi Penerimaan PAD dari Sektor Jasa; Analisis Efektifitas Program Unggulan Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; Penelitian Pengembangan Teknologi Budidaya Jenuh Air Sektor Pertanian; serta Kajian Pengembangan Tata Kelola Pertanian Hortikultura.

**b. Program Kelembagaan dan Kelaksanaan Kegiatan Hakteknas**

Kegiatan yang telah dijalankan dari program Kelembagaan dan Kelaksanaan Kegiatan Hakteknas meliputi Rakorda; serta Dewan Riset Daerah/Sida.

Banyak kendala dan hambatan yang dimiliki yang berasal dari lingkup internal berupa kelemahan dalam Kantor Penelitian dan Pengembangan yaitu :

- 1). Jumlah personil yang sangat terbatas yaitu 4 jabatan eselon IV baru terisi 1 jabatan yaitu kasubbag Tatausaha.
- 2). Jumlah personil hanya 9 orang yang terdiri dari 7 orang PNS dan 2 orang honor.
- 3). Belum memiliki tenaga fungsional peneliti.
- 4). Belum memiliki tenaga peneliti yang sudah bersertifikasi.



- 5). Kemampuan PNS yang belum optimal.

Sedangkan untuk solusi yang dilakukan guna meminimalisir permasalahan diatas yaitu :

- 1). Peningkatan sumberdaya yang tersedia melalui kursus, diklat maupun sekolah terutama yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- 2). Pengisian pejabat eselon.
- 3). Mensosialisasikan hasil penelitian baik secara langsung maupun melalui website.
- 4). Mengadakan kegiatan berupa seminar dengan menghadirkan narasumber berkualitas.

## **8. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan 12 program dan 35 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tertera dalam tabel 4.18 dibawah ini:

**Tabel 4.18**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perhubungan  
Tahun Anggaran 2014





PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.211.739.450,00	1.153.789.271,00	95,22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	626.265.000,00	594.295.050,00	94,90
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	71.261.000,00	69.965.000,00	98,18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000,00	66.882.600,00	95,55
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.500.000,00	16.448.000,00	99,68
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.064.899.425,00	496.185.000,00	46,59
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	4.665.948.583,00	4.500.535.000,00	96,45
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	209.250.000,00	208.347.000,00	99,57
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	65.250.000,00	65.250.000,00	100,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	137.290.000,00	76.336.000,00	55,60
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3.455.000.000,00	2.459.770.400,00	71,19
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	30.110.000,00	12.027.000,00	39,94
<b>JUMLAH</b>	<b>11.623.513.458,00</b>	<b>9.719.830.321,00</b>	<b>83,62</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna jasa angkutan, adupun program ini didukung oleh beberapa kegiatan berupa peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan; pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan; sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan; penyelenggaraan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru; serta penyelenggaraan forum lalulintas kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna jasa perhubungan dengan kegiatan berupa pembangunan dermaga.

**c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan lalu lintas, adapun upaya tersebut dicapai melalui kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas; serta pengadaan pagar pengaman jalan .

**d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**



Inti dari program ini ialah pengujian kelayakan kendaraan bermotor, adapun kegiatan yang mendukung berupa pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.

**e. Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa**

Program ini bertujuan meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antar lembaga politik dengan rakyat dengan kegiatan berupa pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

**f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

Program ini bertujuan memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan di SKPD ini; Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; serta Persiapan pembangunan terminal

**g. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi**

Program ini bertujuan mengetahui perkembangan komunikasi informasi khususnya di kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah monitoring dan evaluasi fasilitas menara telekomunikasi dan warnet. .

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain sebagai berikut :

- 1). Terbatasnya anggaran untuk biaya operasional petugas retribusi menyebabkan beberapa kegiatan tidak maksimal.
- 2). Minimnya sarana dan prasarana penunjang fisik dikantor dinas maupun di pos pengawasan LLASDP dan LLAJ sebagai ujung tombak pelayanan jasa retribusi berdampak terhadap Penerimaan/Pendapatan Daerah.
- 3). Minimnya personil dan SDM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas baik administrasi maupun operasional sebagai tenaga teknis bidang LLAJ, ASDP dan laut.

Upaya pemecahan masalah yang dihadapi yaitu :

Mengusulkan penambahan anggaran ditahun berikutnya berdasarkan kebutuhan sehingga program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dan menambah jumlah sarana prasarana serta personil yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang perhubungan.

Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan



penyeberangan. Sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki ratusan sungai maka keberadaan dermaga-dermaga kecil baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah menentukan denyut nadi perekonomian. Tabel berikut akan menggambarkan pertumbuhan sektor perhubungan tahun 2010-2014.

**Tabel 4.19**  
Perkembangan Sektor Perhubungan Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dermaga (unit)	71	72	78	85	90
2.	Jumlah Dermaga kayu	67	68	69	72	68
3.	Jumlah Dermaga yang dibangun/direhab. menjadi permanen (unit)	4	4	9	13	22
4.	Angkutan Penyeberangan (unit)	113	483	586	951	1490
5.	Kantor Pos (unit)	12	12	13	13	13
6.	Arus penumpang angkutan umum darat (orang)	67.056	67.056	92.965	111.558	150.603
7.	Arus penumpang angkutan umum laut (orang)	11.606	61.297	29.523	22.535	44.515
8.	Jumlah Angkutan (unit)	7.412	9.540	11.743	15.446	13.457
9.	Jumlah Tower (unit)	NN	NN	NN	66	69

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur

Pengembangan sektor perhubungan dilaksanakan terkait dengan peningkatan sarana transportasi. Tantangan dibidang perhubungan masih dirasakan sampai saat ini, dimana sasarannya adalah bagaimana membangun jaringan sarana perhubungan laut/air, dan darat dapat meningkatkan aksesibilitas kecamatan dan desa di pusat-pusat pelayanan publik.

## 9. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.



3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup tertera dalam tabel 4.20 dibawah ini.

**Tabel 4.20**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	386.091.000,00	359.916.340,00	93,22
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	432.740.200,00	413.012.357,00	95,44
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.000.000,00	89.208.900,00	84,96
program peningkatan pengembangan sistem sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.170.000,00	6.950.000,00	84,96
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	452.033.330,00	408.176.800,00	90,30
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	200.500.000,00	194.082.000,00	96,80
Program peningkatan pengendalian polusi	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.638.984.530,00</b>	<b>1.522.796.397,00</b>	<b>92,91</b>

Sumber : Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kab. Tanjab Timur

**a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Adapun beberapa kegiatan pokok diantaranya koordinasi penilaian kota sehat/adipura; pemantauan kualitas lingkungan; pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; pengelolaan B3 dan limbah B3; Pengkajian dampak lingkungan; serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

**b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**



adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.

**c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Adapun beberapa kegiatan pokok diantaranya peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan; dan penyusunan status lingkungan hidup daerah.

**d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian polusi dan pencemaran sehingga akan tercapai lingkungan yang sehat bebas polusi, adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1). Belum terisinya jabatan strategis di Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.
- 2). Belum ada Peraturan Bupati tentang UKL-UPL dan tentang Izin Lingkungan.
- 3). Masih kurangnya pemahaman pihak sekolah tentang sekolah yang berbasis lingkungan hidup (ADIWIYATA).
- 4). Belum Terakreditasinya laboratorium pada Kantor Dampak Lingkungan.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1). Mengusulkan kepada Bupati melalui BKD untuk pengisian jabatan Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- 2). Untuk pembuatan Peraturan Bupati tentang UKL-UPL dan tentang Izin Lingkungan akan dilaksanakan tahun 2014 karena menunggu Surat Edaran dari Kementerian Negara Lingkungan tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
- 3). Sosialisasi kepada pihak sekolah tentang sekolah yang berbasis lingkungan hidup (ADIWIYATA).
- 4). Percepatan akreditasi laboratorium di Kantor Dampak Lingkungan

**10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 6 program dan 30 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertera dalam tabell 4.21 dibawah ini.

**Tabel 4.21**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	697.181.600,00	681.055.874,00	97,69
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	254.196.150,00	247.726.051,00	97,45
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.000.000,00	11.950.000,00	91,92
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	107.888.000,00	107.623.000,00	99,73
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.000.000,00	13.999.500,00	100,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.228.912.700,00	1.221.150.525,00	99,37
<b>JUMLAH</b>	<b>2.315.178.450,00</b>	<b>2.283.504.950,00</b>	<b>98,63</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjab Timur

Sedangkan program dan kegiatan pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah **Program Penataan Administrasi Kependudukan**. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan meningkatkan sistem administrasi pelayanan kependudukan. Untuk mencapai sasaran dibuatlah beberapa kegiatan diantaranya implementasi



sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan); koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan; peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan; sosialisasi kebijakan kependudukan; peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta pengembangan akses pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama ini cukup baik, namun penyelenggaraan urusan kependudukan tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala yang kompleks antara lain :

- 1). Jumlah pegawai yang sangat kurang;
- 2). Masih kurangnya pelatihan pegawai;
- 3). Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Akta Kelahiran dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Identitas Diri);
- 4). Masih sangat kecilnya Nilai Guna /Utility akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik;
- 5). Rendahnya profesionalitas aparatur;
- 6). Pelaksanaan e-KTP banyak terkendala dengan jarak desa yang jauh dan harus ditempuh dengan kendaraan air.
- 7). Masih banyak warga yang belum terdaftar sehingga tidak dapat melakukan perekaman.

Sebagai solusi dan tindak lanjut pembangunan dibidang kependudukan dan catatan sipil pada masa yang akan datang, perlu mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut :

- 1). Penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan;
- 2). Meningkatkan pelatihan tenaga pengelolaan SIAK;
- 3). Meningkatkan sosialisasi baik langsung ke masyarakat maupun melalui media elektronik dan billboard motivasi;
- 4). Optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan dokumen tersebut;
- 5). Mencari alat transportasi yang efektif dan efisien untuk menjangkau daerah yang jauh dan sulit;
- 6). Segera melakukan pendaftaran penduduk dan segera melakukan perekaman bagi yang belum merekam.

Untuk pelayanan kependudukan dalam hal pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP), sejalan dengan kebijakan nasional melalui Sistem Informasi Administrasi





Kependudukan (SIK), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan pada tahun 2014 telah merealisasikan Kartu Keluarga sebanyak 98,18 % dari sasaran yang ditetapkan, sedangkan untuk Kartu Tanda Penduduk sebesar 83,68 % dari sasaran yang ditetapkan serta 57,40 % untuk Akta Kelahiran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.22**  
Target dan Realisasi Administrasi Kependudukan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2014

No	Uraian	Satuan	2013			2014		
			Sasaran	Realisasi	%	Sasaran	Realisasi	%
I	Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk							
1	Kartu Keluarga	KK	74.741	71.471	95,62	77.337	75.928	98,18
2	Kartu Tanda Penduduk	Org	169.606	133.460	78,69	163.342	136.691	83,68
3	Penerbitan surat pindah keluar	Surat	-	866		-	678	
4	Penerbitan surat pindah datang	Surat	-	170		-	430	
II	Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil							
1	Akta Kelahiran	Org	247.256	123.159	49,81	219.732	126.126	57,40
2	Akta Perkawinan	Psgan	-	122			164	
3	Akta Perceraian	Psgan	-	1			4	
4	Akta Kematian	Org	-	51			135	
5	Akta Pengakuan anak	Org	-	1			1	
6	Akta Pengangkatan anak	Org	-	9			9	
7	Akta Kelahiran diatas 1 th (sidang keliling)	Org	-	-		580	121	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Timur

## 11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;



4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan 15 program dan 41 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertera dalam tabel 4.23 dibawah ini.

**Tabel 4.23**

Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	763.607.500,00	723.101.926,00	94,70
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	379.707.500,00	365.164.700,00	96,17
Program peningkatan disiplin aparatur	41.700.000,00	41.700.000,00	100,00
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	11.500.000,00	8.200.000,00	71,30
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.350.000,00	5.222.000,00	97,61
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	78.870.000,00	76.369.300,00	96,83
program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	28.900.000,00	28.843.000,00	99,80
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	367.358.500,00	365.650.000,00	99,53
Program Keluarga Berencana	388.491.000,00	388.108.400,00	99,90
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	50.626.000,00	50.626.000,00	100,00
Program Pelayanan Kontrasepsi	18.875.000,00	18.695.000,00	99,05
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	273.834.000,00	272.564.600,00	99,54
program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	16.675.000,00	16.675.000,00	100,00
program peningkatan penanggulangan narkoba , pms termasuk HIV/AIDS	65.300.000,00	65.255.000,00	99,93
Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	30.850.000,00	30.850.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.526.644.500,00</b>	<b>2.462.024.926,00</b>	<b>97,44</b>

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Tanjab Timur

**a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**



Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) diberbagai bidang pembangunan dengan kegiatan berupa advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan; serta pengembangan sistem informasi gender dan anak.

**b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.

**c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**

Program ini bertujuan untuk mendorong terakomodasinya peran serta perempuan dalam pembangunan. Adapun kegiatan pokoknya meliputi pembinaan organisasi perempuan; penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera; Gerakan Sayang Ibu (GSI); serta DWP Kabupaten Tanjung Jabung Timur..

**d. Program Keluarga Berencana**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran, sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Beberapa kegiatan pokok dari program ini diantaranya penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; pelayanan KIE; peningkatan perlindungan hak reproduksi individu; pembinaan keluarga berencana; serta peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR.

**e. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang, kegiatan dari program ini berupa advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR); serta memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.

**f. Program Pelayanan Kontrasepsi**

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan keluarga berencana kesehatan manunggal dan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi metode



operasi wanita dan metode operasi pria dengan kegiatan berupa pelayanan KB metode operasi.

**g. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri**

Program ini ditunjang beberapa kegiatan diantaranya fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB; operasional kelompok masyarakat peduli KB; koordinasi pengelolaan program; serta pengelolaan data dan informasi program KB.

**h. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**

Program ini ditujukan untuk memberi pelayan untuk remaja dalam kesehatan reproduksi remaja. Kegiatan yang telah ditetapkan dari program ini berupa Pendirian Pusat Pelayanan.

**i. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS dengan kegiatan berupa Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah.

**j. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**

Kegiatan yang telah ditetapkan dari program ini berupa pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

**k. Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga**

Inti dari kegiatan ini adalah pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan.

Hambatan dan kendala yang ditemui dalam capaian kinerja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

- 1) Kualitas sumber daya manusia, masih menjadi kendala sampai tahun 2014.
- 2) Sarana dan prasarana pelayanan KB yang dapat dimobilisasi secara cepat (MUYAN) belum ada.
- 3) Sulitnya melaksanakan pelayanan KB dan penggerakan masyarakat perempuan di wilayah terpencil.
- 4) Minimnya instrument dan pemahaman program bagi tenaga di tingkat lapangan khususnya dibidang pemberdayaan perempuan.



Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi beberapa tenaga lapangan baik di kabupaten maupun provinsi.
- 2) Melaksanakan monev di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna meningkatkan kinerja petugas lapangan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang KB.
- 3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dan penyebarluasan informasi melalui brosur, spanduk dan selebaran.

Hasil kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun 2014 dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya capaian indikator dari tahun sebelumnya. PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efektif mengalami pertumbuhan sebesar 0,21 % dari tahun 2013; PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi mengalami pertumbuhan sebesar 5,43 % dari tahun 2013; Peserta KB baru mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 % dari tahun 2013; dan KB aktif pertumbuhan sebesar 0,02 % dari tahun 2013. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.24**  
Perkembangan Sektor Keluarga Berencana, 2011-2014

No.	Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	
1.	PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efektif	42.785 akseptor	42.966 akseptor	43.067 akseptor	43.156 akseptor	0,21
2.	PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi	380 akseptor	420 akseptor	1.104 akseptor	1.164 akseptor	5,43
3.	Peserta KB baru	12.341 akseptor	13.763 akseptor	13.782 akseptor	13.996 akseptor	1,55
4.	KB Aktif	80,75%	84,36%	84,38%	84,40%	0,02

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Tanjab Timur

## 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok,



Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Lain Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. pengoordinasi pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tertera dalam tabel 4.25 dibawah ini.

**Tabel 4.25**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
program pelayanan administrasi perkantoran	274.174.225,00	271.758.341,00	99,12
program peningkatan sarana dan prasaran aparatur	466.800.000,00	463.966.000,00	99,39
program peningkatan disiplin aparatur	13.800.000,00	13.584.000,00	98,43
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	847.500,00	847.500,00	100,00
program pencegahan dini dan penanggulangan bencana	143.897.000,00	137.746.500,00	95,73
<b>JUMLAH</b>	<b>899.518.725,00</b>	<b>887.902.341,00</b>	<b>98,71</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjab Timur

Program yang dilaksanakan oleh badan ini prinsipnya tentang pencegahan dini dan penanggulangan bencana, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain fasilitasi, koordinasi, pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Selain kegiatan tersebut BPBD yang baru terbentuk tahun 2014 juga melaksanakan kegiatan penguatan / pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana serta sosialisasi perundang-undangan penanggulangan bencana.

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2014 lebih banyak diakibatkan karena kelalaian dari manusia dari pada faktor alam, untuk lebih lengkapnya akan diuraikan pada bab VI dalam dokumen LKPJ ini.



Dalam menjalankan program/kegiatan pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsive ke pendekatan preventif.
- 2) Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan.
- 3) Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
- 4) Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti Pusdalops.
- 5) Belum terciptanya sinkronisasi program penanganan masalah kebencanaan, antara lain penanganan kondisi tanggap darurat serta pasca bencana
- 6) Belum terciptanya singkronisasi program kebencanaan antara SKPD terkait
- 7) Upaya penanggulangan bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
- 8) Fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mengoptimal belum tercipta secara baik.
- 9) Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak penggunaan biaya dan personil yang benar
- 10) Belum terciptanya standar penilaian pasca bencana dalam upaya pelaksanaan rehabilitas dan rekontruksi.
- 11) Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran , prosedur, peralatan, sarana dan prasarana (Kantor yang belum memadai sesuai dengan kebutuhan) personil.

Permasalahan yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dicarikan solusi pemecahannya, adapun upaya-upaya yang dilaksanakan diantaranya :

- 1) Mengoptimalkan pegawai yang ada sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Menata dan menginventarisir potensi bencana yang biasa terjadi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan penaggulangan bencana.





- 3) Mengajukan permohonan peralatan dasar penanggulangan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu penanganan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kab. Tanjung Jabung Timur.
- 4) Mengajukan permintaan pertambahan personil Kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Badan Kepegawaian daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5) Melakukan pelatihan terhadap Team Reaksi Cepat (TRC) sehingga TRC ini bias membantu dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6) Penyebarluasan informasi potensi bencana yang bisa terjadi ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, pembuatan baliho penanggulangan bencana, poster-poster serta himbauan melalui Camat dan Kepala desa setempat.

### **13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 15 program dan 49 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertera dalam tabel 4.26 dibawah ini.



**Tabel 4.26**  
**Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran**  
**Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2014**

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program pemberdayaan fiskir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	35.392.000,00	35.349.700,00	99,88
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	417.020.000,00	409.594.600,00	98,22
Program pembinaan anak terlantar	28.450.000,00	28.060.000,00	98,63
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	13.850.000,00	11.344.600,00	81,91
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	85.145.000,00	79.205.000,00	81,91
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	683.102.000,00	669.130.100,00	93,02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.175.000.000,00	1.164.759.230,00	99,13
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.050.000,00	19.050.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82.000.000,00	80.259.100,00	97,88
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	109.841.500,00	109.841.450,00	100,00
program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	1.840.032.000,00	1.803.900.000,00	97,95
program peningkatan kesempatan kerja	85.632.000,00	85.632.000,00	99,13
program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	114.320.500,00	114.250.000,00	99,94
program pembinaan hubungan industri	22.650.000,00	22.650.000,00	97,88
Program Pengembangan wilayah transmigrasi	479.395.000,00	459.276.200,00	95,80
<b>JUMLAH</b>	<b>5.190.880.000,00</b>	<b>5.092.301.980,00</b>	<b>98,10</b>

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kab. Tanjab Timur

**a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**

Program ini bertujuan membantu fakir miskin yang akan melakukan usaha untuk peningkatan kesejahteraan, adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.

**b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);



penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; pemberian bantuan UEP bagi lansia produktif; peringatan hari besar nasional (hari pahlawan); Penanganan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga harapan (PKH) serta Sosialisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.

**c. Program Pembinaan Anak Terlantar**

Program ini membantu anak terlantar melalui pembekalan hidup, adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan UEP dan pelatihan/kursus.

**d. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma**

Program ini membantu para penyandang cacat dan trauma melalui bantuan dana jaminan sosial dan alat bantu, adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan dana jaminan sosial dan alat bantu bagi penyandang cacat berat dan trauma dan unit pelayanan sosial keliling dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat.

**e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Program ini berupa pemberian bantuan stimulan UEP Tagana dan kelembagaan kessos lainnya adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Simulasi bencana banjir dan kebakaran anggota taruna siaga bencana (TAGANA); peningkatan kualitas SDM masyarakat dan simulasi/pembentukan lokasi kampung siaga bencana (KSB); serta sosialisasi program pemberdayaan karang taruna..

**f. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Adapun kegiatan berupa pembangunan balai latihan kerja dan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

**g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

Program ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja sehingga jumlah pengangguran di kabupaten ini dapat berkurang, adapun kegiatan yang mendukung program ini antara lain penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja; serta pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.

**h. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**



Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan pemberi kerja, kegiatan pokoknya berupa fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial; sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan; serta peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **i. Program Pembinaan Hubungan Industrial**

Program ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjadi fasilitator antara perusahaan dan tenaga kerja, adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembentukan/pembinaan LKS Bi/Tripartit.

#### **j. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Program ini ditunjang oleh beberapa kegiatan diantaranya berupa peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi; serta Fasilitasi dan sertifikasi lahan transmigrasi; sosialisasi progres kegiatan program kota terpadu mandiri.

Dalam menjalankan program/kegiatan pokoknya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Belum tersedianya instruktur khusus di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Pengawas untuk menjangkau Perusahaan yang ada di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3) Tidak adanya transportasi pengawas sehingga sulit untuk menjangkau perusahaan-perusahaan yang jauh.
- 4) Belum optimalnya jaringan internet untuk Kegiatan Bursa Kerja Online (BKOL), sehingga tidak dapat mensupport Bursa Online Nasional.
- 5) Di perlukan kegiatan penyusun ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6) Tidak adanya bantuan pada tahun 2014 yang dapat di berikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di sebabkan pengurangan anggaran pada saat APBDP.



- 7) Ditiadakannya kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Karang Taruna pada tahun 2014 disebabkan penghematan anggaran pada saat APBDP, sehingga minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Karang Taruna dalam organisasi masyarakat guna mendukung kegiatan penanganan PMKS.
- 8) Ditiadakannya kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dan Simulasi/Pembentukan Lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB) pada Tahun 2014 disebabkan penghematan anggaran pada saat APBDP, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana dan tidak terbentuknya Kampung Siaga Bencana.

Permasalahan yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dicarikan solusi pemecahannya, adapun upaya-upaya yang dilaksanakan diantaranya :

- 1) Melaksanakan Diklat untuk instruktur khusus di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Menambah tenaga pengawas yang telah selesai pendidikan kepengawasan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3) Meningkatkan Jaringan Internet sehingga dapat mendukung kegiatan Bursa Online Nasional.
- 4) Diperlukan kegiatan penyusun ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5) Untuk dapat dianggarkan kembali bantuan kepada seluruh Penyandang Masalah Kesjahteraan Sosial (PMKS).
- 6) Untuk dapat dianggarkan kembali Kegiatan Sosial Pemberdaya Karang Taruna guna perna aktif Karang Taruna dalam penanganan PMKS.
- 7) Untuk dapat dianggarkan kembali kegiatan Peningkatan kualitas SDM Masyarakat dan Simulasi/Pembentukan Lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB).

Dibidang ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan baik PMA maupun PMDN pada periode 2010-2014 selalu meningkat setiap tahunnya, peningkatan ini linear dengan peningkatan jumlah PMA maupun PMDN. Keadaan ini membuat rasio daya serap tenaga kerja semakin kecil atau dengan kata lain pergerakan penyerapan tenaga kerja tidak lebih besar dari pertumbuhan PMA maupun PMDN atau perusahaan yang masuk merupakan jenis perusahaan yang padat modal bukan merupakan perusahaan padat karya.

**Tabel 4.27**  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010-2014



No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.031	3.517	4.127	4.208	4.297
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	20	25	31	33	36
3	Rasio daya serap tenaga kerja	152	141	133	127	119

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kab. Tanjab Timur

#### 14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaksanakan 9 program dan 40 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tertera dalam tabel 4.28 dibawah ini.

**Tabel 4.28**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:	587.603.900,00	557.283.700,00	94,84
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.515.000,00	135.286.300,00	97,67
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.750.000,00	10.350.000,00	88,09
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.345.100,00	19.500.000,00	83,53
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	228.975.600,00	178.161.300,00	77,81



Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	192.652.500,00	178.433.000,00	92,62
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	460.657.700,00	389.131.350,00	373,09
Program pengembangan Sistem pendukung usaha bagi UMKM	539.178.100,00	473.317.450,00	87,78
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	427.741.500,00	420.748.300,00	98,37
<b>JUMLAH</b>	<b>2.610.419.400,00</b>	<b>2.362.211.400,00</b>	<b>90,49</b>

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kab. Tanjab Timur

**a. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, non diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah dengan kegiatan diantaranya penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah; sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah; fasilitasi pengembangan koperasi dan UKM; serta fasilitasi permasalahan proses produksi UKM.

**b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan koperasi / KUD. Dengan manajemen yang profesional diharapkan koperasi dapat berkembang dengan pesat. Hal ini dilakukan dengan kegiatan antara lain : pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD; memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha mikro kecil menengah; peningkatan kerjasama di bidang HAKI; penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; serta peningkatan kemitraan bagi UMKM.

**c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi faktor-faktor yang mendukung usaha UMKM. Pelaksanaan dari program ini seperti sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan; koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi; koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM; pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM; peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga; penyelenggaraan promosi produk UMKM; serta pengembangan kebijakan dan program ekonomi lokal.

**d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**





Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sebagai wadah kepentingan bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif sehingga citra koperasi semakin membaik dengan kegiatan diantaranya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi; pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian; sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi; peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi; serta penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan menghadapi kendala antara lain:

- 1) Kondisi alam yang sulit dijangkau secara cepat dan mahal biaya transportasi;
- 2) Masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM;
- 3) Masih lemahnya kesadaran berkoperasi dan arti pentingnya koperasi oleh anggota;
- 4) Masih lemahnya koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan koperasi dan UMKM;
- 5) Masih rendahnya kesadaran dan aspirasi anggota masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang bernilai jual dalam meningkatkan pendapatan koperasi dan masyarakat;
- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan;
- 7) Masih terbatasnya alokasi dana yang tersedia untuk menunjang program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir dan menyelesaikan masalah adalah:

- 1) Memenuhi sarana dan prasarana transportasi yang memadai dengan biaya yang murah di setiap desa/kelurahan/kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap UKM.
- 3) Meningkatkan koordinasi antar dinas instansi dalam rangka pembinaan terhadap UKM dan pelaku usaha.



- 4) Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola SDA yang tersedia menjadi barang dengan nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga.
- 5) Meningkatkan alokasi dana yang memadai dalam menunjang program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja koperasi ditunjukkan berbagai ukuran seperti :1) Jumlah koperasi, 2) Jumlah anggota, 3) Simpanan, 4) Modal, 5) Volume usaha, dan 6) Sisa Hasil Usaha (SHU). Sampai dengan Tahun 2014, koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik KUD maupun non KUD berjumlah 297 unit, sebanyak 128 unit diantaranya termasuk koperasi aktif, selebihnya merupakan koperasi tidak aktif. Jumlah anggota dari 287 unit koperasi tersebut sebanyak 24.229 orang yang terdiri dari 7.697 orang merupakan anggota KUD dan 16.532 orang merupakan anggota Non KUD.

**Tabel 4.29**  
Jumlah KUD dan Non KUD  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2014

NO	KECAMATAN	KOPERASI		AKTIF		TIDAK AKTIF		ANGGOTA	
		KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD
1	Muara Sabak Barat	2	27	0	15	2	12	97	1.248
2	Muara Sabak Timur	5	42	0	14	5	28	3.277	1.954
3	Kuala Jambi	1	18	0	13	1	5	292	579
4	Dendang	6	30	0	22	6	8	675	4.609
5	Mendahara	3	37	0	5	3	32	182	2.008
6	Mendahara Ulu	1	17	1	4	0	13	352	1.357
7	Geragai	5	30	0	23	5	7	400	1.838
8	Rantau Rasau	8	10	1	8	7	2	1.166	393
9	Berbak	3	4	1	4	2	0	831	222
10	Nipah Panjang	4	26	0	12	4	14	254	1.464
11	Sadu	3	15	0	5	3	10	171	860
	<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>	<b>256</b>	<b>3</b>	<b>125</b>	<b>38</b>	<b>131</b>	<b>7.697</b>	<b>16.532</b>

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kab. Tanjab Timur

KUD di kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai penyerapan modal baik bersumber dari sendiri maupun pihak luar sebesar Rp. 6.012.282.960,00; volume usaha sebesar Rp. 4.512.946.066,00 dan simpanan sebesar Rp. 369.023.155,00; serta sisa hasil usaha sebesar Rp. 184.136.845,00. Sedangkan untuk non KUD mempunyai penyerapan modal baik bersumber dari sendiri maupun pihak luar sebesar Rp. 14.736.916.881,00; volume usaha sebesar Rp. 19.725.449.848,00 dan simpanan sebesar Rp. 3.637.690.416,00; serta sisa hasil usaha sebesar Rp. 1.775.765.948,00.



**Tabel 4.30**  
Jumlah Simpanan, Modal, Volume Usaha dan SHU KUD 2014

NO	KECAMATAN	KUD	SIMPANAN (Rp)	PERMODALAN (Rp)	VOLUME USAHA (Rp)	SHU (Rp)
1	Muara Sabak Barat	2	30.467.955	15.339.800	15.339.800	7.934.955
2	Muara Sabak Timur	5	101.029.000	2.234.244.176	3.250.322.670	11.927.160
3	Kuala Jambi	1	4.613.750	10.978.725	15.436.755	6.364.975
4	Dendang	6	56.992.000	1.292.739.706	680.990.450	22.424.565
5	Mendahara	3	14.830.000	81.980.213	101.782.676	17.965.700
6	Mendahara Ulu	1	12.000.000	147.000.000	147.000.000	35.000.000
7	Geragai	5	66.181.500	240.774.031	68.030.725	23.292.000
8	Rantau Rasau	8	33.305.025	568.544.759	7.377.950	18.201.525
9	Berbak	3	18.622.300	709.026.234	57.956.070	8.467.600
10	Nipah Panjang	4	14.668.350	627.579.941	39.063.230	18.555.785
11	Sadu	3	16.313.275	84.075.375	49.645.740	14.002.580
	<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>	<b>369.023.155</b>	<b>6.012.282.960</b>	<b>4.512.946.066</b>	<b>184.136.845</b>

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kab. Tanjab Timur

**Tabel 4.31**  
Jumlah Simpanan, Modal, Volume Usaha dan SHU Non KUD 2014

NO	KECAMATAN	NON KUD	SIMPANAN (Rp)	PERMODALAN (Rp)	VOLUME USAHA (Rp)	SHU (Rp)
1	Muara Sabak Barat	27	289.933.500	833.151.130	1.540.683.511	47.975.806
2	Muara Sabak Timur	42	535.138.440	3.177.938.193	5.804.856.249	237.005.262
3	Kuala Jambi	18	536.003.650	1.215.628.700	1.081.726.942	335.529.107
4	Dendang	30	1.070.042.921	2.579.287.106	5.412.301.435	496.403.956
5	Mendahara	37	255.565.300	1.331.588.280	1.527.151.419	215.162.090
6	Mendahara Ulu	17	165.325.000	1.552.800.580	2.211.941.757	47.969.580
7	Geragai	30	245.504.275	1.787.383.034	790.863.545	91.955.823
8	Rantau Rasau	10	102.530.000	211.462.224	142.962.880	87.135.924
9	Berbak	4	40.205.000	337.863.203	448.387.950	76.389.500
10	Nipah Panjang	26	216.274.990	883.264.211	643.042.560	32.319.500
11	Sadu	15	181.167.340	826.550.220	121.531.600	107.919.400
	<b>JUMLAH</b>	<b>256</b>	<b>3.637.690.416</b>	<b>14.736.916.881</b>	<b>19.725.449.848</b>	<b>1.775.765.948</b>

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kab. Tanjab Timur

## 15. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah



dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang keamanan dan ketertiban;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keamanan dan ketertiban;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan dan ketertiban; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada Tahun 2014, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 7 program dan 25 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tertera dalam tabel 4.32 dibawah ini.

**Tabel 4.32**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.321.550.250,00	1.303.214.691,00	98,61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	546.673.700,00	539.138.350,00	98,62
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	142.639.600,00	142.103.400,00	99,62
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	263.175.000,00	199.699.600,00	75,88
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.458.000,00	11.579.800,00	70,36
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	94.670.000,00	91.044.350,00	96,17
program pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman umum, serta penegakan perda dan peraturan kepala daerah	55.826.000,00	55.526.000,00	99,46
<b>JUMLAH</b>	<b>2.440.992.550,00</b>	<b>2.342.306.191,00</b>	<b>95,96</b>

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Timur

Anggaran yang dialokasi untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada prinsipnya hanya digunakan untuk operasional pengamanan aset daerah, penegakkan Peraturan Daerah dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban antara lain :

- 1) Kepegawaian anggota Pol-PP masih banyak berstatus tenaga honor dan tenaga kontrak.



- 2) Tingkat pendidikan anggota Pol-PP yang bervariasi.
- 3) Prosedur tetap (Protap) belum dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 4) Penyikapan terhadap situasi masih rendah, lebih menunggu perintah atau instruksi.
- 5) Kelembagaan masih belum berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Belum adanya Juknis tentang Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- 7) Pemberdayaan PPNS belum optimal dimasing-masing SKPD.
- 8) PPNS belum termasuk jabatan fungsional.

Berdasarkan uraian di atas, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengurangi atau meminimalisir permasalahan yang ada antara lain dengan:

- 1) Mengusulkan pengangkatan tenaga honor/kontrak menjadi CPNS kepada Bupati melalui BKD.
- 2) Pelaksanaan pendidikan singkat sebagai martikulasi pengetahuan anggota.
- 3) Penyusunan Prosedur tetap (Protap) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 4) Pelatihan daya responsif anggota terhadap lingkungan sekitar.
- 5) Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mengenai kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Penyusunan petunjuk teknis pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
- 7) Sosialisasi dan melaksanakan pelatihan secara berkala kepada PPNS

#### **16. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan



4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 12 program dan 37 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tertera dalam tabel 4.33 dibawah ini.

**Tabel 4.33**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	573.706.050,00	553.091.962,00	96,41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	222.242.600,00	216.962.589,00	97,62
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.450.000,00	10.450.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia	19.000.000,00	18.250.000,00	96,05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	144.426.700,00	143.645.900,00	99,46
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	855.420.000,00	851.266.200,00	99,51
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	425.469.700,00	416.326.900,00	97,85
program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	195.824.500,00	178.717.581,00	91,69
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	19.860.000,00	18.210.000,00	89,50
Program Pendidikan Politik Masyarakat	475.759.000,00	425.814.300,00	89,50
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	99.320.500,00	99.517.100,00	100,20
program kerjasama penanggulangan bencana (PB) daerah	179.385.200,00	179.385.200,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.220.864.250,00</b>	<b>3.111.637.732,00</b>	<b>96,61</b>

Sumber : Badan Kesbangpol linmas Kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam rangka memelihara dan mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama melalui pembinaan dan pelatihan anggota linmas dalam upaya peningkatan pemahaman anggota terhadap kelinmasan serta menggandakan pelaksanaan rangkaian acara dalam rangka peringatan hari-hari



besar nasional agar berjalan dengan tertib dan aman. Adapun kegiatan pokoknya meliputi penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan; dan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.

**b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama, organisasi masyarakat dan kerukunan bangsa, dengan kegiatan berupa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); serta Nation Bulding Character/pembangunan karakter bangsa.

**c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasa dan sikap nasionalisme organisasi masyarakat dan generasi muda dengan kegiatan diantaranya kerjasama pemerintah daerah dengan ORMAS, LSM dan OKP; peningkatan wawasan kebangsaan pelajar tingkat SLTA; serta lomba cipta karya tulis ilmiah dan seminar empat pilar kebangsaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**

Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan kegiatan diantaranya Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

**e. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**

Program ini bertujuan untuk memberantas penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman terbebas dari penyakit masyarakat. Adapun program ini didukung oleh kegiatan berupa penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.

**f. Program Pendidikan Politik Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan etika berpolitik bagi ormas, orsos, dan masyarakat melalui penyuluhan. Adapun kegiatannya berupa Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA); bimbingan teknis tentang bantuan keuangan partai politik; Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik; koordinasi kegiatan orang asing;





penanganan gangguan keamanan; serta pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik.

**g. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan tim penanggulangan bencana, aparat kecamatan/desa dan warga masyarakat rawan bencana, lokasi bencana dan korban bencana alam, tercukupinya kebutuhan masyarakat yang kekurangan air bersih melalui droping air bersih serta merelokasi warga yang berada di daerah rawan bencana yang ditunjang dengan kegiatan berupa pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam; serta pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara.

**h. Program Kerjasama Penanggulangan Bencana (PB) Daerah**

Pelaksanaan program ini dilaksanakan sebelum BPBD terbentuk, dengan kegiatan berupa Operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap masih dihadapkan kepada berbagai hambatan dan kendala yang cukup kompleks dan cenderung dinamis. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

- 1) Kurangnya personil yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini dan juga sebagian personil yang kurang menguasai bidang tugasnya.
- 2) Kondisi ORMAS, LSM, PARPOL dan Organisasi lainnya keberadaan yang terpecah di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaannya maupun untuk menghubungi yang berakibat belum tercapainya salah satu kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3) Kurangnya koordinasi dan kecakapan Satlinmas Kecamatan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ataupun kendala yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau meminimalisir masalah antara lain:

- 1) Meningkatkan disiplin kerja pegawai yang sangat minim jumlahnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan/program kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Menata dan menginventarisir kembali keberadaan ORMAS/LSM/PARPOL dan Organisasi lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,



sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.

- 3) Mengajukan permintaan penambahan personil kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama struktural eselon IV /a .
- 4) Mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- 5) Memperdayakan Satgas Linmas Kabupaten sebanyak 31 orang, Satgas Linmas Kecamatan sebanyak 110 orang, Satgas Linmas Desa/Kelurahan sebanyak 465 orang untuk deteksi dini sekaligus evakuasi dan penanggulangan bencana.

Kehidupan demokrasi juga tumbuh dan berkembang hal ini ditandai dengan terbentuknya 30 pengurus daerah partai politik, namun dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 lalu hanya 8 partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Saat ini lembaga DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 30 anggota, 5 diantaranya perempuan.

**Tabel 4.34**

Jumlah Partai Politik yang Memiliki Kursi di DPRD  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2014-2019

NO	NAMA PARPOL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Partai Amanat Nasional	12	3	15
2	Partai Golongan Karya	2	0	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	1	3
4	Partai Hati Nurani Rakyat	2	1	3
5	Partai Demokrat	2	0	2
6	Partai Bulan Bintang	2	0	2
7	Partai Nasional Demokrat	2	0	2
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>5</b>	<b>30</b>

Sumber : Badan Kesbangpol linmas Kab. Tanjung Jabung Timur

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang bantuan keuangan



kepada partai politik. Adapun besaran bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014 sebesar Rp. 686.883.867,00 dan terealisasi sebesar Rp. 670.047.067,00 atau 97,55 %.

**Tabel 4.35**  
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik  
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014

NO	NAMA PARPOL	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - PAN	306.766.133	306.766.133	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Partai Golkar	61.759.867	61.759.867	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - PDI Perjuangan	58.486.800	58.486.800	100,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Hanura	49.141.333	49.141.333	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Partai Demokrat	55.202.400	55.202.400	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Parpol – Partai Demokrasi Kebangsaan	25.749.333	25.749.333	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Gerindra	32.256.934	32.256.934	100,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Parpol – Partai Keadilan Sejahtera	15.961.867	15.961.867	100,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Partai Kebangkitan Bangsa	14.334.400	14.334.400	100,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Partai Karya Peduli Bangsa	16.836.800	-	0,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Parpol – Partai Bulan Bintang	29.668.400	29.668.400	100,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Parpol – Nasdem	20.719.600	20.719.600	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>686.883.867</b>	<b>670.047.067</b>	<b>97,55</b>

Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

## 17. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pada Tahun 2014, Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program dan 35 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat DPRD tertera dalam tabel 4.36 dibawah ini.



**Tabel 4.36**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.439.801.425,00	7.109.021.744,00	95,55
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.488.475.535,00	2.369.864.885,00	95,23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	398.600.000,00	396.812.500,00	99,55
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	170.750.000,00	137.912.150,00	80,77
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	6.593.185.000,00	5.895.305.550,00	89,42
<b>JUMLAH</b>	<b>17.090.811.960,00</b>	<b>15.908.916.829,00</b>	<b>93,08</b>

Sumber : Sekretariat Dewan Kab. Tanjung Jabung Timur

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD antara lain yaitu **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**. Program ini mempunyai kegiatan berupa hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama; rapat-rapat paripurna; kegiatan reses; kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah; peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; sosialisasi peraturan perundang-undangan; penyusunan rancangan peraturan daerah hak inisiatif; kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah. Dalam menjalankan fungsi legestasinya, pada tahun 2014 ini telah berhasil dihasilkan sebanyak 15 perda.

**Tabel 4.37**  
Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2014

NO	PERATURAN DAERAH		TENTANG
	NOMOR	TAHUN	
1	1	2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company menjadi Perseroan Terbatas Sabak Holding Company.
2	2	2014	Izin Lokasi
3	3	2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
4	4	2014	Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Berkualitas Di Puskesmas dan Jaringannya.
5	5	2014	Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6	6	2014	Pengelolaan dan Pemberdaya Pasar Tradisional
7	7	2014	Tarif Air Minum
8	8	2014	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
9	11	2014	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013
10	12	2014	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
11	13	2014	Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif Migas



12	14	2014	Pengelolaan dan Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
13	15	2014	Perubahan RPJMD
14	16	2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Perintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi
15	17	2014	APBD Tahun Anggaran 2015

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

## 18. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
3. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Sekretariat Daerah melaksanakan 24 program dan 98 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat Daerah tertera dalam tabel 4.38 dibawah ini.

**Tabel 4.38**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Daerah

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.011.359.500,00	9.255.065.760,00	92,45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.578.720.300,00	3.448.469.300,00	96,36
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	261.056.500,00	260.731.500,00	99,88
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.000.000,00	26.500.000,00	80,30



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.295.000,00	25.010.000,00	98,87
Program Peningkatan kualitas Iman dan Taqwa Generasi Qurani	4.669.400.800,00	4.524.286.700,00	96,89
program peningkatan kerjasama pembinaan masyarakat	39.287.400,00	22.812.400,00	58,07
program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	171.835.000,00	161.940.000,00	94,24
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.292.975.500,00	1.247.660.910,00	96,50
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	220.670.000,00	218.103.500,00	98,84
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	698.522.600,00	664.886.050,00	95,18
Program Penataan Daerah Otonomi	781.534.000,00	729.854.300,00	93,39
program penataan pelayanan publik	65.743.900,00	65.710.000,00	99,95
Program Penataan Perangkat Daerah	400.209.000,00	392.693.500,00	98,12
Program Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	65.555.000,00	64.185.000,00	97,91
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	30.052.500,00	28.106.750,00	93,53
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	235.020.000,00	225.547.500,00	95,97
program pembinaan dan pengembangan aparatur	33.911.000,00	33.911.000,00	100,00
program fasilitasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan profesi	523.140.000,00	436.835.800,00	83,50
Program pengembangan E-government	1.098.942.800,00	1.078.467.819,00	98,14
Program pembinaan generasi muda	80.300.000,00	70.856.300,00	88,24
program pembangunan zona integritas menuju wilayah pemerintah kab.tanjabtjm	111.300.000,00	111.097.600,00	99,82
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.629.020.000,00	1.602.808.000,00	98,39
Program Kerjasama Informasi dengan mas Media	3.812.457.000,00	3.777.130.700,00	99,07
<b>JUMLAH</b>	<b>29.869.307.800,00</b>	<b>28.472.670.389,00</b>	<b>95,32</b>

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.

**a. Program Peningkatan Kualitas Iman dan Taqwa Generasi Muda Qurani**

Program ini ditunjang oleh beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten; pelaksanaan TC MTQ tingkat kabupaten; pelaksanaan MTQ tingkat propinsi; pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha; pengembangan Qori-Qoriah, Hafizh-Hafizhah dan kaligrafer potensial; sunatan massal; kegiatan pesantren kilat anak yatim; pelaksanaan festival anak saleh Indonesia; pelaksanaan TC festival anak saleh Indonesia tingkat kabupaten;



pelaksanaan festival anak saleh Indonesia tingkat provinsi; pelaksanaan TC MTQ tingkat provinsi; pengembangan pondok pesantren Tahfizh; pelaksanaan kegiatan Jema'ah haji dan Umroh; serta pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pasca Haji.

**b. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Program ini dimaksudkan untuk membina dan memfasilitasi wirausahawan dengan modal yang diberikan pemerintah daerah sehingga diharapkan usaha yang dijalankan akan dapat lebih berkembang, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan dan pengelolaan kredit modal kerja pedesaan/kelurahan.

**c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Kegiatan dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH diantaranya pengawasan tim raskin ke 11 kecamatan tentang distribusi raskin; pengawasan, pengkajian, pengendalian dan penyaluran dana KUPEM; peningkatan koordinasi dan pengawasan kegiatan lintas sektoral bidang ekonomi; pengawasan distribusi pupuk bersubsidi; pengendalian kegiatan pembangunan; sistem administrasi pelaporan kegiatan pembangunan; penyusunan program kerja pembangunan; koordinasi dan pengendalian pertambangan dan energi; koordinasi dan pengendalian dampak lingkungan hidup; koordinasi dan pengendalian kehutanan, perkebunan dan pertanian; monitoring, evaluasi dan sosialisasi kebakaran lahan dan hutan; koordinasi dan pengendalian potensi daerah; pelaksanaan penyaluran santunan kematian; serta Monitoring dan penyelesaian TP. TGR.

**d. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Inti dari program ini guna penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemerintah daerah, adapun kegiatannya ialah penanganan kasus-kasus Pemkab (advokasi dan kuasa hukum).

**e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Program penataan peraturan perundang-undangan memiliki kegiatan diantaranya penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan; legislasi rancangan peraturan perundang-undangan; fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan; publikasi peraturan perundang-undangan; kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah; serta penyusunan abstrak produk hukum daerah.



**f. Program Penataan Daerah Otonomi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik hingga lapisan terendah, adapun kegiatan dari program ini diantaranya pengelolaan pemerintahan umum; penataan dan pengawasan batas daerah; peningkatan kapasitas Camat; serta pembakuan nama rupa bumi.

**g. Program Penataan Pelayanan Publik**

Program bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah penataan pelayanan publik kepada masyarakat.

**h. Program Penataan Perangkat Daerah**

Program penataan perangkat daerah memiliki kegiatan berupa penataan kelembagaan perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; penyusunan prosedur indeks kepuasan masyarakat, standar Operasional Prosedur; Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi; serta penataan tata naskah dinas.

**i. Program Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah**

Program ini bertujuan untuk lebih mengefektikan pelaksanaan pemerintahan dari sisi pembagian tugas pokok. Adapun kegiatannya berupa penyusunan dan penyempurnaan tupoksi daerah.

**j. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah**

Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah dengan kegiatan diantaranya pengembangan promosi potensi daerah.

**k. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Program ini dimaksudkan untuk meminimalisir sengketa lahan yang terjadi di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program ini ditunjang dengan kegiatan berupa fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

**l. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**





Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil diperlukan pembinaan dan pengembangan aparatur, sehingga diperlukan kegiatan berupa pembinaan kader KORPRI.

**m. Program Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan ialah hari-hari besar keagamaan; pelaksanaan pelatihan pengurusan jenazah; serta pelaksanaan pengajian rutin BKMT.

**n. Program Pengembangan E-Government**

Sebagai sarana melaksanakan Perpes Nomor 54 Tahun 2010 tentang mekanisme pelelangan dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah maka dilaksanakan kegiatan Sistem layanan pengadaan secara Elektronik (LPSE); dan Unit layanan pengadaan (ULP).

**o. Program Pembinaan Generasi Muda**

Program ini ditunjang dengan kegiatan berupa penyelenggaraan kegiatan Tabligh Akbar; dan pencegahan HIV.

**p. Program Pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi**

Sebagai upaya pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, diperlukan kegiatan berupa percepatan pencegahan bahaya korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**q. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Kegiatan dari program pengembangan komunikasi , informasi dan media massa diantaranya berupa pengadaan barang dan jasa dokumentasi; pembuatan majalah/cetakan berkala; penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan media center; serta penataan dan pengelolaan studio dan komunikasi.

**r. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**

Program kerjasama informasi dengan mass media memiliki kegiatan berupa penyebaran informasi pembangunan daerah; penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah; berlangganan majalah dan surat kabar harian, mingguan, bulanan; publikasi penerangan masyarakat, sosialisasi dan promosi; serta penataan, pengkajian dan pengembangan sistem data, informasi dan komunikasi.

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2014 oleh Sekretariat Daerah antara lain:



- 1). Masih kurangnya kasubbag dalam pelaksanaan administrasi dalam beberapa bagian di Sekretariat Daerah.
- 2). Kurangnya sarana penunjang kerja.
- 3). Lambannya penyerapan dana KMK oleh masyarakat karena salah satu syarat peminjaman adalah agunan berupa sertifikat, sementara masyarakat hanya memiliki sporadik.
- 4). Data PPLS tentang RTS-PM raskin sudah tidak sesuai dengan fakta lapangan.
- 5). Penebusan raskin yang dilakukan oleh pihak desa selalu lambat karena tidak semua masyarakat dapat melakukan setoran secara tepat waktu.
- 6). Kurangnya koordinasi antara pihak desa dengan kecamatan serta kurang aktifnya Satker kecamatan dan desa.
- 7). Banyaknya nasabah yang pindah alamat, meninggal dan usahanya tidak aktif lagi sehingga menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya pelunasan kredit serta kurangnya kesadaran masyarakat.
- 8). Pengecer dan distributor tidak pernah melaporkan jadwal penyaluran dan penebusan, jenis pupuk, jumlah pupuk dan penerima pupuk bersubsidi.

Solusi yang dapat dilakukan guna meminimalisir permasalahan yang timbul, antara lain :

- 1). Memberdayakan personil yang ada agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 2). Memaksimalkan sarana penunjang yang ada.
- 3). BPS harus melaksanakan pendataan ulang di tahun 2015 sehingga penerima raskin dapat tepat sasaran.
- 4). Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar kredit secara tepat waktu.
- 5). Meningkatkan koordinasi satker di kecamatan
- 6). Adanya kebijakan Pemprov terhadap jaminan nasabah KUPEM yang macet seperti mengeksekusi agunan atau melakukan pemutihan.
- 7). Perlu adanya koordinasi dan penekanan terhadap distributor dan pengecer tentang penyaluran pupuk bersubsidi.

Sejalan dengan implementasi Otonomi Daerah, berbagai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Tabel berikut akan menggambarkan produk hukum yang dihasilkan tahun 2010-2014.

**Tabel 4.39**  
Jumlah Produk Hukum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2010-2014



NO	NAMA PERATURAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	Peraturan Daerah	3 produk	11 produk	11 produk	20 produk	15 produk
2	Peraturan Bupati	23 produk	18 produk	43 produk	42 produk	30 produk
3	Keputusan Bupati	309 produk	430 produk	513 produk	527 produk	532 produk
3	Prolegda	-	-	11 buah	20 buah	10 buah

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.

Dalam upaya peningkatan kualitas iman dan taqwa generasi muda Qurani, kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2014 telah berhasil meraih Juara Umum FASI tingkat Provinsi Jambi dan Peringkat ke-8 FASI tingkat Nasional.

### 19. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kepegawaian daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 8 program dan 54 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Kepegawaian Daerah tertera dalam tabel 4.40 dibawah ini.

**Tabel 4.40**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Badan Kepegawaian Daerah  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.059.975.600,00	1.044.406.255,00	98,53



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	793.262.000,00	781.157.000,00	98,47
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	193.575.000,00	166.200.000,00	85,86
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	58.814.000,00	58.781.760,00	99,95
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00
Program Pendidikan Kedinasan	661.875.000,00	191.752.185,00	28,97
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	670.599.500,00	633.527.610,00	94,47
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.437.777.400,00	2.270.019.035,00	93,12
<b>JUMLAH</b>	<b>5.888.078.500,00</b>	<b>5.158.043.845,00</b>	<b>87,60</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan dari program peningkatan disiplin aparatur berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; rekapitulasi evaluasi absensi PNS lingkup Tanjab Timur; pengadaan kartu tanda pengenal (ID CARD); pemeriksaan kesehatan (*general check up*) PNS yang sakit; serta pengambilan sumpah PNS.

**b. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**

Dengan kegiatan diantaranya pemulangan pegawai yang pensiun; pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas; serta prosesan usulan pensiun dan pangkat pengabdian.

**c. Program Pendidikan Kedinasan**

Kegiatan dari program ini antara lain peningkatan keterampilan dan profesionalisme; pendidikan dan penjejaran struktural Diklatpim II dan III; pendidikan dan penjejaran struktural Diklatpim IV; serta kontribusi diklat prajabatan golongan III.

**d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Adapun kegiatannya dari program ini diantaranya berupa pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah golongan II; pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah golongan III; evaluasi dan pemrosesan pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD); sosialisasi



peraturan kepegawaian; penyusunan pedoman standar penilaian kerja PNS; sosialisasi peraturan pension aparatur sipil Negara; serta sosialisasi Bapetarum PNS.

**e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Untuk menunjang program pembinaan dan pengembangan aparatur, dibuatlah beberapa kegiatan seleksi penerimaan calon PNS; penataan sistem administrasi pengurusan kenaikan pangkat otomatis PNS; proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN; diklat manajemen barang milik daerah; pengelolaan kenaikan gaji berkala dan cuti PNS; pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian Daerah; pelayanan kartu taspen, taperum, dan kartu pegawai; operasional tim bidang pertimbangan jabatan dan kepangkatan; pemberian bantuan pendidikan di PTN/PTS; penyusunan formasi PNS; penempatan PNS/distribusi PNS; penataan system pengurusan pengangkatan fungsional PNS/Impassing PNS fungsional; pembekalan masa persiapan pension; proses penyesuaian masa kerja; diklat penilaian angka kredit (PAK) tenaga guru; diklat standar kinerja pegawai (SKP); proses penetapan NIP calon pegawai negeri sipil; workshop analisis kebutuhan diklat; pemberian tanda jasa; pemberian penghargaan bagi PNS teladan; proses status hukum; serta diklat teknis kebutuhan analisi diklat;

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih terdapat kekosongan jabatan struktural pada setiap SKPD
2. Jumlah SDM dibidang diklat yang memiliki sertifikat TOC, MOC dan MOT sebagai persyaratan bagi penyelenggara diklat masih kurang.
3. Belum sinkronnya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Jambi dengan rencana alokasi anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah.
4. Proses pelayanan administrasi yang tidak tepat waktu karena keterlambatan penyerahan berkas dari SKPD.
5. Minimnya informasi tentang prosedur dan syarat dalam melengkapi berkas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi kepegawaian BKD Nomor 88 Tahun 2012.



6. Minimnya pengetahuan tentang peraturan kepegawaian dan disiplin PNS.
7. Masihkurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di gedung diklat BKD KabupatenTanjung JabungTimur.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan diatas, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai keahlian, kompetensi dan beban kerja.
2. PNS yang belum memiliki sertifikat TOC, MOC dan MOTakan diusulkan untuk mengikuti diklat dimaksud baik yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Jambi maupun oleh instansi pusat.
3. Mengusulkan dan memberikan informasi tentang pelaksanaan diklat yang akan dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Badan Diklat Daerah Provinsi Jambi melalui rakor kedilatan.
4. Setiap Pegawai Negeri Sipil hendaknya update terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
5. Setiap Pegawai Negeri Sipil hendaknya memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian BKD Nomor 88 Tahun 2012.
6. Secara bertahap BKD akan melengkapi sarana dan prasarana serta melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan yang ada di gedung diklat.

Berikut merupakan komposisi pegawai lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2014.

**Tabel 4.41**  
Komposisi Aparatur Negara  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2010-2014

No	Aparatur Negara	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Σ PNS</b>		<b>4.521</b>	<b>4.702</b>	<b>4.603</b>	<b>3.561</b>	<b>4.497</b>
1	Golongan I	95	68	67	68	50
2	Golongan II	1.392	1.380	1.308	1.280	1.158
3	Golongan III	2.302	2.284	2.102	2.101	2.186
4	Golongan IV	732	970	1126	112	1103
<b>Σ Pejabat eselon</b>		<b>394</b>	<b>420</b>	<b>477</b>	<b>558</b>	<b>551</b>
1	Eselon I	-	-	-	-	-
2	Eselon II	20	25	26	26	29
3	Eselon III	132	156	141	160	161
4	Eselon IV	242	239	310	372	361
<b>Σ Menurut Pendidikan</b>		<b>4.521</b>	<b>4.702</b>	<b>4.603</b>	<b>4.561</b>	<b>4.497</b>
1	SD	45	72	69	58	55
2	SMP	80	81	78	69	64
3	SLTA	1.127	1.061	1.032	990	935



4	DI & DII	649	875	839	751	682
5	DIII	844	563	549	560	563
6	S1 & DIV	1.756	2.033	2.008	2.066	2.105
7	S2	20	17	28	67	93
8	S3	-	-	-	-	-
<b>Σ Pejabat Fungsional</b>		<b>2.659</b>	<b>3.060</b>	<b>2.954</b>	<b>2.806</b>	<b>2.867</b>
1	Pejabat Fungsional	2.659	3.060	2.954	2.806	2.867

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

## 20. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 6 program dan 43 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tertera dalam tabel 4.42 dibawah ini.

**Tabel 4.42**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.276.965.500,00	3.916.984.235,00	91,58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.251.339.200,00	1.105.245.500,00	88,33
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	29.300.000,00	25.183.638,00	85,95
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	117.050.000,00	15.000.000,00	12,82
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	148.652.500,00	141.424.100,00	95,14
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	6.210.334.813,00	5.521.264.893,00	88,90



daerah			
<b>JUMLAH</b>	<b>12.033.642.013,00</b>	<b>10.725.102.366,00</b>	<b>89,13</b>

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

#### a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini ditunjang dengan kegiatan diantaranya penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; penyusunan sistem informasi keuangan daerah; bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah; peningkatan manajemen aset/barang daerah; intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; pendataan objek pajak dan retribusi daerah; sistem informasi dan manajemen gaji; pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; pengamanan aset milik pemerintah; pengendalian keuangan daerah; penyusunan laporan keuangan akuntansi wilayah; sosialisasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan PAD; operasional UPTD wilayah timur; operasional UPTD wilayah barat; pemutakiran data pajak bumi dan bangunan; penerimaan pembiayaan daerah; serta pengeluaran pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2014, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain :

- 1) Dalam upaya meningkatkan pencapaian sistem keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabilitas dirasa masih rendahnya tingkat keberhasilan koordinasi dengan SKPD lain.
- 2) Dalam upaya meningkatkan pengelolaan manajemen aset/khususnya dalam sertifikasi lahan milik Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur, peran dari instansi vertikal (BPN) masih terkendala birokrasi yang panjang.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan meminimalisir permasalahan tersebut adalah :

- 1) Melakukan rapat koordinasi secara rutin dan wajib dihadiri oleh pejabat yang berwenang mengambil kebijakan.





- 2) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi vertikal yang berkompeten dalam rangka memperpendek birokrasi dan rentang waktu.

## 21. Inspektorat

Inspektorat merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pada Tahun 2014, Inspektorat melaksanakan 7 program dan 30 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Inspektorat tertera dalam tabel 4.43 dibawah ini.

**Tabel 4.43**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	581.371.900,00	578.143.000,00	99,44
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	473.000.000,00	469.858.881,00	99,34
Program Peningkatan disiplin aparatur	13.250.000,00	13.250.000,00	100,00
Program peningkatan pengembangan sistem palaporan capaian kinerja dan keuangan	14.000.000,00	13.894.000,00	99,24
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.929.009.600,00	1.928.086.850,00	99,95
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	258.550.000,00	256.891.550,00	99,36
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	102.720.000,00	102.609.800,00	99,89
<b>JUMLAH</b>	<b>3.371.901.500,00</b>	<b>3.362.734.081,00</b>	<b>99,73</b>

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur

### a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah



Program ini memiliki beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; tindak lanjut hasil temuan pengawasan; koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; evaluasi berkala temuan hasil pengawasan; monitoring dan evaluasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa; ekspose hasil pemeriksaan dan penyusunan LHP; monitoring dan penyelesaian TP-TGR; serta percepatan tindak lanjut.

**b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

Pelaksanaan program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan berupa pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; serta pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

**c. Program Penataan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**

Program ini didukung melalui kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**d. Peningkatan system pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur**

Program ini didukung melalui kegiatan melalui peningkatan system pengawasan melalui pengelolaan keuangan yang berbasis E-audit; rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi serta pelaksanaan sosialisasi SPIP.

Beberapa permasalahan/kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan SKPD antara lain :

- 1) Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengawasan karena keterbatasan jumlah dan kualitas auditor.
- 2) Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu adanya koordinasi yang intens dan menyeluruh.
- 3) Masih adanya OBRIK/SKPD yang belum sepenuhnya mampu menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya saksi yang tegas terhadap obrik yang tidak atau belum melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
- 4) kurangnya pemahaman obrik terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan.
- 5) Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga.
- 6) Masih kurangnya kesadaran Objek Pemeriksaan (SKPD) mengenai tupoksi inspektorat sebagai leading sektor dalam hal pengawasan dan pembinaan,



sehingga pada saat pemeriksaan dan pengawasan dilakukan, obrik tidak mengindahkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan inspektorat.

Solusi yang dilaksanakan untuk meminimalisir permasalahan tersebut kedepan antara lain:

- 1) Pengiriman staf untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tenaga auditor lebih ditingkatkan.
- 2) Koordinasi lebih intens untuk meningkatkan sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dan antar APIPDA.
- 3) Pemutakhiran data yang berkaitan dengan temuan dan hasil pengawasan akan lebih diintensifkan.
- 4) Pendekatan dengan objek pemeriksaan (SKPD) lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembinaan akan berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

**Tabel 4.44**

Target dan Realisasi Pemeriksaan Internal dan Review, 2012-2014

Kegiatan	2014		
	Target	Realisasi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>			
<b>1.1 Pengawasan Internal secara Berkala</b>			
Pemeriksaan Kasus/Khusus	17 kasus	24 kasus	
Pemeriksaan Reguler/Sertijab	43 SKPD	38 SKPD	
Inspeksi Mendadak	3 Paket	3 Paket	1 pkt untuk 11 kec
Dana BOS / Pemeriksaan PAD	1 Pkt	1 pkt	1 pkt utk 7 tim
<b>1.2 Review, Monitoring dan Evaluasi</b>			
Review Laporan Keuangan SKPD	32 SKPD	32 SKPD	
Evaluasi LAKIP SKPD	32 SKPD	32 SKPD	
Monitoring ADD/Monitoring Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Obr	8 Obr	dialihkan ke monitoring pengelolaan barang milik daerah
Monitoring Penutupan Kas	4 Pkt	3 Pkt	1 pkt utk 32 SKPD, 11 Kec
Pre Audit / Monitoring Khusus	17 Kasus	17 Kasus	
<b>1.3 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	11 Kec	11 Kec	

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur

## 22. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2



Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perizinan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Perizinan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perizinan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan 8 program dan 27 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tertera dalam tabel 4.45 dibawah ini.

**Tabel 4.45**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Pelayanan Terpadu  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	636.210.000,00	623.580.332,00	98,01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151.200.000,00	149.501.800,00	98,88
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.450.000,00	7.450.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.000.000,00	10.007.000,00	83,39
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	297.050.000,00	294.652.500,00	99,19
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	435.600.000,00	433.254.300,00	99,46
program penataan peraturan perundang-undangan	27.700.000,00	27.650.000,00	99,82
<b>JUMLAH</b>	<b>1.600.210.000,00</b>	<b>1.579.095.932,00</b>	<b>98,68</b>

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pelayanan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa



penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik; dan sosialisasi sistem informasi terhadap layanan publik.

**b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**

Tujuan program ini adalah untuk menjalin dan meningkatkan hubungan ekonomi, sosial dan budaya antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya yang saling menguntungkan. Adapun kegiatan pokoknya dari program ini meliputi penataan pelayanan perizinan satu pintu; pendataan pelayanan perizinan satu pintu; dan evaluasi dan penertiban pelayanan perizinan terpadu serta indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selama tahun 2014, diantaranya :

- 1) Masih terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan proses pelayanan perizinan.
- 2) Masih kurangnya SDM aparatur (kuantitas) pada KPPT, masih terdapatnya penggunaan tenaga honor pada proses pelayanan perizinan dan belum terisinya kasubbag TU.
- 3) Kelembagaan yang masih berstatus kantor sehingga koordinasi dengan SKPD teknis berkaitan dengan perizinan masih belum optimal.
- 4) PTSP-PM (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal) yang belum ada di KPPT masih melekat pada SKPD Bappeda.
- 5) Aturan/regulasi daerah yang berkaitan dengan perizinan yang masih lemah.
- 6) Kurang optimalnya peran tim teknis dalam proses pelayanan perizinan.
- 7) Kondisi Geografis yang masih sulit terjangkau sehingga masyarakat yang jauh untuk mengurus perizinan menjadi kendala.
- 8) Letak bangunan KPPT yang kurang strategis. KPPT merupakan salah satu instansi pelayanan publik di bidang perizinan yang idealnya secara administratif mudah dipahami, jelas, transparan, pasti dan secara tata letak kantor juga mudah dilihat publik.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk meminimalisir / memecahkan masalah, antara lain :

- 1) Mengikuti pelatihan/bintek tentang pelayanan perizinan sehingga dapat meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.
- 2) Mengusulkan untuk penambahan pegawai khususnya pada bagian pelayanan perizinan dan pengisian pejabat struktural pada KPPT.



- 3) Perlu diadakan forum evaluasi tim teknis dan forum evaluasi tim pengawasan terpadu dan penertiban perizinan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kerja tim teknis serta tim pengawasan terpadu, penertiban dan untuk menerima masukan /saran perbaikan pelaksanaan kerja tim yang dapat dijadikan rekomendasi di tahun berikutnya.
- 4) Mengotimalkan pelaksanaan pelayanan perizinan ditempat dengan menggunakan mobil pelayanan keliling.
- 5) Menyiapkan aturan/regulasi daerah yang berkaitan dengan perizinan sebagai dasar kepastian hukum bagi penyelenggara perizinan maupun penerima izin.

Keberadaan KPPT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan suatu prestasi yang bisa dibanggakan. Kebijakan ini pada dasarnya untuk memberi batasan yang lebih tegas antara institusi yang membuat kebijakan dengan institusi yang melaksanakan kebijakan dan operasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 23 jenis perizinan yang dilimpahkan ke KPPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 telah memberikan pelayanan perizinan ± 10.594 izin. Izin yang dikeluarkan dari tahun 2008 sampai dengan 2014 terus meningkat setiap tahunnya, periode tahun 2014 ada sebanyak 2.444 izin yang dikeluarkan. Peningkatan ini mengindikasikan investasi maupun pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin menggembirakan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel 4.46 berikut.

**Tabel. 4.46**  
Jumlah Izin yang Dikeluarkan, 2008-2014

No	Jenis Izin	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1	IMB	35	194	118	80	231	109	169	936
2	SITU	13	169	237	267	476	452	480	2094
3	SIUP	22	162	230	260	449	455	468	2046
4	TDP	19	143	228	263	460	456	470	2039
5	HO	0	0	177	235	475	447	488	1822
6	SIUJK	5	95	65	32	62	51	27	337
7	Praktek Dokter	0	9	16	16	5	8	13	67
8	Praktek Bidan	0	8	12	75	49	32	28	204
9	Praktek Perawat	0	2	3	6	1	2	12	26
10	Toko Obat	0	3	3	2	0	2	2	12
11	Reklame	1	5	4	5	245	168	241	669
12	Apotek	0	0	0	0	0	1	3	4



13	IPM	3	11	19	77	30	11	0	151
14	IUI	0	0	1	1	0	1	0	3
15	TDI	0	0	1	4	2	14	6	27
16	IUP	1	0	0	1	1	0	0	3
17	IUP-Pengelolaan	0	1	0	0	0	0	0	1
18	IUP-Budidaya	0	2	2	0	0	2	1	7
19	Galian C	2	2	2	9	13	12	13	53
20	Izin lokasi	8	2	6	15	4	2	7	44
21	Izin prinsip	5	12	4	1	0	0	13	35
22	Izin Klinik	0	0	0	1	1	2	2	6
23	TDG	0	0	0	3	2	2	1	8
<b>JUMLAH</b>		<b>114</b>	<b>820</b>	<b>1.128</b>	<b>1.353</b>	<b>2.506</b>	<b>2.229</b>	<b>2.444</b>	<b>10.594</b>
<b>Pertumbuhan pertahun</b>			<b>619,30</b>	<b>37,56</b>	<b>19,95</b>	<b>85,22</b>	<b>-11,05</b>	<b>9,65</b>	

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, KPPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala terhadap responden yang menerima layanan izin mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan izin. Hasil penilaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada KPPT berdasarkan 14 (empat belas) unsur pelayanan pada tahun 2014 semester I sebesar 80,315 atau dalam kategori B (baik) sedangkan pada semester II meningkat menjadi sebesar 83,496 atau dalam kategori A (sangat baik).

### 23. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Lain Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
2. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental, dan rohani;
3. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;



4. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat pengurus KORPRI; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

Pada Tahun 2014, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia melaksanakan 3 program dan 11 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia tertera dalam tabel 4.47 dibawah ini.

**Tabel 4.47**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	155.748.000,00	144.207.000,00	92,59
Program peningkatan sarana dan prasarana	41.341.000,00	37.904.000,00	91,69
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	22.000.000,00	15.500.000,00	70,45
<b>JUMLAH</b>	<b>219.089.000,00</b>	<b>197.611.000,00</b>	<b>90,20</b>

Sumber : Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kab. Tanjab. Timur

Program yang dilaksanakan oleh SKPD ini prinsipnya tentang pembinaan dan fasilitasi terhadap pegawai sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Selain kegiatan tersebut Sekretariat Korpri yang baru terbentuk tahun 2014 juga melaksanakan kegiatan penguatan / pengembangan kelembagaan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai SKPD yang baru terbentuk antara lain :

- 1) Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia
- 2) Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan termasuk gedung kantor
- 3) Belum adanya program kerja Dewan Pengurus KOPRI yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus, baik lima tahunan maupun tahunan

Secara bertahap permasalahan tersebut akan diminimalisir pada tahun 2015 ini dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang diharapkan dapat membantu seperti Sekretariat Daerah, Bappeda maupun BKD.

## 24. Kecamatan

Sebelas Kecamatan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun





2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Total program dan kegiatan yang dilaksanakan 11 kecamatan pada tahun 2013 sebanyak 102 program dan 284 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja pada 11 kecamatan tertera dalam tabel 4.48 dibawah ini.

**Tabel 4.48**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan 11 Kecamatan  
Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014

NO	KECAMATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4.111.616.869,00	3.918.346.484,00	95,30
2	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	3.174.427.469,00	3.147.815.690,00	99,16
3	KECAMATAN MENDAHARA	2.458.911.069,35	2.426.535.275,00	98,68
4	KECAMATAN MENDAHARA ULU	2.413.910.369,00	2.153.025.300,00	89,19
5	KECAMATAN GERAGAI	2.313.746.701,00	2.286.415.350,00	98,82
6	KECAMATAN KUALA JAMBI	2.381.832.219,00	2.360.499.877,00	99,10
7	KECAMATAN DENDANG	2.519.136.601,00	2.461.440.883,00	97,71
8	KECAMATAN BERBAK	2.364.758.469,00	2.264.528.250,00	95,76
9	KECAMATAN RANTAU RASAU	2.256.116.919,00	2.248.145.892,00	99,65
10	KECAMATAN NIPAH PANJANG	2.726.872.569,00	2.719.772.427,00	99,74
11	KECAMATAN SADU	2.586.450.969,00	2.447.167.753,00	94,61
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.307.780.223,35</b>	<b>28.433.693.181,00</b>	<b>97,02</b>

Sumber : 11 Kecamatan kab. Tanjung Jabung Timur.

#### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini berisikan kegiatan penunjang administrasi perkoantoran seperti jasa surat menyurat, jasa komunikasi, air dan listrik, jasa perlengkapan dan



peralatan kantor, jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, makan dan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

**b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini lebih menitikberatkan pada sarana infrastruktur dan pemeliharaan fasilitas kantor seperti pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur.

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pada program ini berisikan kegiatan tentang pengadaan pakaian dinas pegawai di kecamatan

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini berisikan tentang penyusunan capaian kinerja dan keuangan kecamatan yang disusun dalam dokumen pelaporan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

**e. Program Satu Milyar Satu Kecamatan Provinsi Jambi**

Program ini merupakan program dari provinsi Jambi yang bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin sehingga kesejahteraan kehidupan dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Selain bedah rumah, bantuan yang diberikan antara lain berupa beasiswa, alsintan, motor roda tiga, pelatihan dan sertifikasi tanah.

**f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Subtansi dari program ini ialah alokasi anggaran di kelurahan baik untuk operasional/rutin maupun pembangunan di masing-masing kelurahan. Anggaran ini dikelola oleh masing-masing kelurahan yang ada.

**g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang administrasi kependudukan, kegiatan yang mendukung program ini berupa penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.

**h. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin**



Program ini merupakan program dari kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin sehingga kesejahteraan kehidupan dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Adapun kegiatan yang mendukung program ini ialah bedah rumah.

Adapun target dan realisasi dari program Samisake di 11 kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.49**  
Target dan Realisasi Program Samisake  
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014

No	Kecamatan	TARGET		REALISASI		%
		Unit	Anggaran (Rp)	Unit	Anggaran (Rp)	
<b>I</b>	<b>BEDAH RUMAH</b>					
1	Rantau Rasau	58	580.000.000	58	580.000.000	100,00
2	Sadu	67	670.000.000	67	670.000.000	100,00
3	Mendahara	74	746.480.534	74	740.000.000	99,13
4	Geragai	59	590.000.000	59	589.498.200	99,91
5	Muara Sabak Timur	71	710.366.069	71	710.000.000	99,95
6	Kuala Jambi	53	530.000.000	53	530.000.000	100,00
7	Berbak	70	700.000.000	70	700.000.000	100,00
8	Mendahara Ulu	59	590.000.000	39	390.000.000	66,10
9	Dendang	76	760.000.000	76	753.509.366	99,15
10	Muara Sabak Barat	81	818.661.069	80	800.000.000	97,72
11	Nipah Panjang	57	570.000.000	57	570.000.000	100,00
<b>Total</b>		<b>725</b>	<b>7.265.507.673</b>	<b>704</b>	<b>7.033.007.566</b>	<b>96,80</b>
<b>II</b>	<b>SERTIFIKASI</b>					
1	Rantau Rasau	-	-	-	-	-
2	Sadu	-	-	-	-	-
3	Mendahara	72	72.730.535	72	72.679.435	99,93
4	Geragai	-	-	-	-	-
5	Muara Sabak Timur	-	-	-	-	-
6	Kuala Jambi	-	-	-	-	-
7	Berbak	-	-	-	-	-
8	Mendahara Ulu	7	7.261.069	-	-	0,00
9	Dendang	-	-	-	-	-
10	Muara Sabak Barat	-	-	-	-	-
11	Nipah Panjang	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>79</b>	<b>79.991.604</b>	<b>72</b>	<b>72.679.435</b>	<b>90,86</b>



III	<b>BEASISWA</b>					
1	Rantau Rasau	199	171.500.000	196	168.500.000	98,25
2	Sadu	204	166.000.000	199	159.250.000	95,93
3	Mendahara	126	119.500.000	96	90.500.000	75,83
4	Geragai	434	415.750.000	279	255.750.000	61,52
5	Muara Sabak Timur	192	197.500.000	177	180.250.000	91,27
6	Kuala Jambi	338	332.000.000	309	301.250.000	90,74
7	Berbak	241	197.000.000	213	171.500.000	87,06
8	Mendahara Ulu	172	148.500.000	154	133.250.000	89,73
9	Dendang	85	85.000.000	79	77.500.000	91,18
10	Muara Sabak Barat	156	150.000.000	142	136.250.000	90,83
11	Nipah Panjang	101	92.500.000	65	55.250.000	59,73
<b>Total</b>		<b>2.248</b>	<b>2.075.250.000</b>	<b>1.909</b>	<b>1.729.250.000</b>	<b>83,33</b>
IV	<b>ALSINTAN</b>					
1	Rantau Rasau	-	-	-	-	-
2	Sadu	1	28.261.069	1	28.000.000	99,08
3	Mendahara	-	-	-	-	-
4	Geragai	2	45.580.535	2	44.800.000	98,29
5	Muara Sabak Timur	-	-	-	-	-
6	Kuala Jambi	-	-	-	-	-
7	Berbak	2	47.230.535	2	46.700.000	98,88
8	Mendahara Ulu	-	-	-	-	-
9	Dendang	2	55.456.101	2	54.264.000	97,85
10	Muara Sabak Barat	-	-	-	-	-
11	Nipah Panjang	3	182.086.069	3	180.000.000	98,85
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>358.614.310</b>	<b>24</b>	<b>353.764.000</b>	<b>98,65</b>
V	<b>RODA 3</b>					
1	Rantau Rasau	1	29.461.069	1	29.000.000	98,43
2	Sadu	2	61.000.000	2	54.000.000	88,52
3	Mendahara	-	-	-	-	-
4	Geragai	4	123.809.416	4	120.000.000	96,92
5	Muara Sabak Timur	-	-	-	-	-
6	Kuala Jambi	5	145.261.069	5	145.000.000	99,82
7	Berbak	1	28.000.000	1	27.000.000	96,43
8	Mendahara Ulu	4	120.000.000	4	120.000.000	100,00
9	Dendang	2	60.000.000	2	59.840.000	99,73
10	Muara Sabak Barat	-	-	-	-	-
11	Nipah Panjang	2	54.000.000	2	54.000.000	100,00
<b>Total</b>		<b>21</b>	<b>621.531.555</b>	<b>21</b>	<b>608.840.000</b>	<b>97,96</b>



VI	<b>BANTUAN MODAL</b>					
1	Rantau Rasau	11	55.000.000	11	55.000.000	100,00
2	Sadu	-	-	-	-	-
3	Mendahara	-	-	-	-	-
4	Geragai	-	-	-	-	-
5	Muara Sabak Timur	-	-	-	-	-
6	Kuala Jambi	-	-	-	-	-
7	Berbak	4	20.000.000	4	20.000.000	100,00
8	Mendahara Ulu	12	60.000.000	2	10.000.000	16,67
9	Dendang	-	-	-	-	-
10	Muara Sabak Barat	12	60.000.000	-	-	0,00
11	Nipah Panjang	8	40.000.000	8	40.000.000	100,00
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>235.000.000</b>	<b>25</b>	<b>125.000.000</b>	<b>53,19</b>
VII	<b>PELATIHAN TENAGA KERJA</b>					
1	Rantau Rasau	13	40.000.000	13	413.610.000	
2	Sadu	12	40.000.000	12		
3	Mendahara	12	40.000.000	12		
4	Geragai	12	40.000.000	12		
5	Muara Sabak Timur	10	40.000.000	10		
6	Kuala Jambi	12	40.000.000	12		
7	Berbak	12	40.000.000	12		
8	Mendahara Ulu	12	40.000.000	12		
9	Dendang	12	40.000.000	12		
10	Muara Sabak Barat	12	40.000.000	12		
11	Nipah Panjang	12	40.000.000	12		
<b>Total</b>		<b>131</b>	<b>440.000.000</b>	<b>131</b>	<b>413.610.000</b>	<b>94,00</b>

Sumber : 11 Kecamatan kab. Tanjung Jabung Timur, 2014, data diolah.

Sedangkan target dan realisasi dari program Bedah Rumah Samudra di 11 kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.50**  
Target dan Realisasi Program Bedah Rumah Samudra  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014

No	KECAMATAN	BEDAH RUMAH SAMUDRA TA. 2014					KETERANGAN
		TARGET		REALISASI		(%)	
		JUMLAH (UNIT)	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (UNIT)	PAGU ANGGARAN		
1	Kuala Jambi	35	350.000.000	35	350.000.000	100	
2	Muara Sabak Barat	43	430.000.000	43	430.000.000	100	
3	Dendang	62	620.000.000	60	592.901.238	95,63	2 unit rumah tidak terealisasi dikarenakan Pindah Rumah
4	Mendahara	62		62		100	



			620.000.000		620.000.000		
5	Muara Sabak Timur	72	720.000.000	72	720.000.000	100	
6	Rantau Rasau	60	600.000.000	60	600.000.000	100	
7	Sadu	56	560.000.000	56	560.000.000	100	
8	Geragai	42	420.000.000	42	420.000.000	100	
9	Berbak	54	540.000.000	54	540.000.000	100	
10	Nipah Panjang	54	540.000.000	54	540.000.000	100	
11	Mendahara Ulu	60	600.000.000	55	550.000.000	91,67	5 unit rumah tidak terealisasi dikarenakan Rumah sudah layak huni
<b>JUMLAH</b>		<b>600</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>484</b>	<b>5.922.901.238</b>	<b>98,85</b>	

Sumber : 11 Kecamatan kab. Tanjung Jabung Timur, 2014, data diolah.

## 25. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPD/K)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan melaksanakan 13 program dan 36 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan tertera dalam tabel 4.51 dibawah ini.



**abel 4.51**  
**Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran**  
**Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa/Kelurahan**  
**Tahun Anggaran 2014**

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	420.690.000,00	406.000.138,00	96,51
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.027.330.000,00	992.096.130,00	96,57
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.050.000,00	11.050.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	28.000.000,00	27.000.000,00	96,43
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.560.000,00	69.886.600,00	86,75
program penyedia jasa administrasi keuangan	11.010.000,00	6.450.000,00	58,58
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	790.125.000,00	774.984.450,00	98,08
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	670.332.500,00	665.871.305,00	99,33
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	409.705.500,00	368.220.750,00	89,87
program peningkatan peran perempuan di pedesaan	914.600.000,00	898.292.850,00	98,22
Program Pengembangan sarana/prasarana perumahan dan lingkungan desa/kelurahan	111.300.000,00	110.673.000,00	99,44
Program Penguatan Otonomi Desa	287.615.000,00	262.860.235,00	91,39
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	102.000.000,00	101.935.450,00	99,94
<b>JUMLAH</b>	<b>4.864.318.000,00</b>	<b>4.695.320.908,00</b>	<b>96,53</b>

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa/Kelurahan Kab. Tanjab Timur

**a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

Kegiatan dari program ini diantaranya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan; pembinaan penguatan kapasitas monitoring dan evaluasi PNPM; serta pembinaan, monitoring; evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD); serta pembinaan dan administrasi proyek PNPM pola khusus MP3KI.

**b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

Adapun beberapa kegiatan yang telah dijalankan dari program peningkatan partisipasi masyarakat diantaranya pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat; pengembangan usaha ekonomi desa/kelurahan; pengelolaan dan pembangunan pasar desa; pendataan aset desa; peningkatan pembinaan posyandu; serta pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan.



**c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan kawasan perdesaan, dengan kegiatan berupa pembinaan aparatur pemerintah desa/kelurahan; dan penyusunan profil desa.

**d. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan di perdesaan dengan kegiatan berupa gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.

**e. Program Pengembangan Sarana/Prasarana Perumahan dan Lingkungan Desa/ Kelurahan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan rumah dan lingkungan sehat di desa/kelurahan, adapun program ini akan didukung melalui kegiatan berupa penataan lingkungan sehat.

**f. Program Penguatan Otonomi Desa**

Kegiatan yang mendukung upaya penguatan otonomi desa berupa penetapan dan penegasan tapal batas desa/kelurahan; dan fasilitasi pelayanan pengembangan adat istiadat dan nilai budaya masyarakat.

**g. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong aplikasi teknologi tepat guna, dengan kegiatan berupa fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa permasalahan internal antara lain terbatasnya personil seperti petugas teknis di bidang-bidang.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan melibatkan personil di sekretariat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis dengan bimbingan dan pengawasan dari Kepala Badan maupun Kepala Bidang bersangkutan.

Disamping menjalankan tugas-tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tiap desa. BPMPD/K juga berperan dalam menyusun formulasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan output dari kebijakan Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa dengan instrumennya berupa pengalokasikan dana transfer berupa dana perimbangan untuk pembangunan desa





yang besarnya minimal dari 10% dari Dana perimbangan yang diterima masing-masing daerah.

Untuk lebih memacu pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa, Pemda meningkatkan Alokasi Dana Desa melalui APBD 2014, yang jumlahnya Rp. 33.771.849.492,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.767.548.908,00 atau 99,99 %. Dengan demikian pada Tahun anggaran 2014 setiap desa memperoleh Rp. 330 juta sampai dengan Rp. 600 juta. Anggaran ADD ini diperuntukan antara lain untuk kegiatan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola dan operasional kantor desa.

## 26. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data

Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data melaksanakan 9 program dan 27 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan Belanja Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data tertera dalam tabel 4.52 dibawah ini.

**Tabel 4.52**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	409.848.031,00	389.673.696,00	95,08
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.548.944.000,00	1.490.212.850,00	96,21



Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.100.000,00	6.750.000,00	95,07
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	13.500.000,00	11.800.000,00	87,41
program peningkatan kualitas pelayanan informasi	85.459.000,00	85.044.750,00	99,52
Program Pengembangan budaya baca	110.552.000,00	109.463.000,00	99,01
Program pembinaan perpustakaan	140.359.000,00	140.168.000,00	99,86
Program orientasi dan pembinaan arsip	33.745.575,00	33.245.575,00	98,52
Program penyimpanan dan pelestarian arsip	15.384.250,00	14.497.250,00	94,23
<b>JUMLAH</b>	<b>2.364.891.856,00</b>	<b>2.280.855.121,00</b>	<b>96,45</b>

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan diperlukan penilaian sebagai dasar dari perbaikan pelayanan, pada program ini disusun Indeks Kepuasan Masyarakat dan sosialisasi, pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi.

**b. Program Pengembangan Budaya Baca**

Tujuan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat dengan memperluas pengetahuan melalui buku. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibuatlah kegiatan berupa lomba bercerita tingkat SD/Sederajat se-kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan lomba berpidato.

**c. Program Pembinaan Perpustakaan**

Tujuan program pembinaan perpustakaan adalah meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan, untuk mencapai sasaran program tersebut dibuatlah kegiatan berupa peningkatan mutu pelayanan informasi perpustakaan; pelatihan pengelolaan perpustakaan; lomba perpustakaan desa serta lomba perpustakaan tingkat SMP/Sederajat.

**d. Program Orientasi dan Pembinaan Arsip**

Adapun beberapa kegiatan yang telah dijalankan program Orientasi dan Pembinaan Arsip adalah sosialisasi peraturan-peraturan kearsipan serta bimbingan teknis kearsipan pada satuan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung timur.

**e. Program Penyimpanan dan Pelestarian Arsip**

Program ini bertujuan untuk menjaga dan menyimpan arsip sehingga akan mudah dalam terjaga dan mudah dalam pencarian. Adapun beberapa kegiatan



yang telah dijalankan program penyimpanan dan pelestarian arsip pengumpulan, akuisisi, pengelolaan dan pemeliharaan arsip.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Terbatasnya jumlah tenaga / SDM, sarana dan prasarana yang ada dikantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data.
- 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membaca.
- 3) Kondisi geografis yang sulit terjangkau sehingga masyarakat yang jauh untuk meminjam buku menghabiskan waktu yang lama.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Magang dan BinteK serta pelatihan guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Pengolahan Buku Perpustakaan, dan Arsip Daerah.
- 2) Mempersiapkan Software dan Perangkat Teknologi seperti Komputer agar pelayanan dapat cepat dan tepat.
- 3) Melaksanakan Sosialisasi dan Standarisasi pelayanan melalui media cetak, elektronik dan pertemuan langsung ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- 4) Mengusulkan pada anggaran tahun berikutnya untuk penambahan Pegawai / Pejabat Struktural untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lapangan.

Perpustakaan Kabupaten Tanjung Jabung sampai dengantahun 2014 telah memiliki koleksi buku sebanyak 25.823 eksemplar dengan 7.273 judul buku. Sedangkan jumlah buku yang ada di desa sebanyak 41.738 eksemplar dengan 63.238 judul buku.

**Tabel 4.53**  
Perkembangan Koleksi Buku  
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data, 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah buku di kabupaten	14.727 eksemplar	18.773 eksemplar	25.583 eksemplar	25.823 eksemplar
2	Judul buku di kabupaten	4.315 judul buku	5.827 judul buku	7.189 judul buku	7.273 judul buku
3	Jumlah buku di desa	35.790 eksemplar	41.738 eksemplar	41.738 eksemplar	41.738 eksemplar
4	Judul buku di desa	54.290 judul	63.238 judul	63.238 judul	63.238 judul
5	Jumlah Perpustakaan di Desa/Kelurahan	93 unit	93 unit	93 unit	

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Kab. Tanjung Jabung Timur



## B. URUSAN PILIHAN

### 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian Tanaman Pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada Tahun 2014, Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan 11 program dan 35 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan tertera dalam tabel 4.54 dibawah ini.

**Tabel 4.54**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pertanian TPH  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	550.581.839,00	544.916.902,00	98,97
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	538.894.161,00	516.895.600,00	95,92
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.950.000,00	19.950.000,00	100,00
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000,00	9.636.000,00	96,36
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	84.385.000,00	83.836.198,00	99,35
program peningkatan kesejahteraan petani	426.489.500,00	411.354.500,00	96,45
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)	6.180.345.700,00	5.980.916.310,00	96,77
program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	96.200.000,00	95.931.400,00	99,72
program peningkatan penerapan teknologi pertanian	3.169.625.000,00	2.823.713.640,00	89,09



program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.339.792.600,00	2.301.160.700,00	98,35
program pengembangan sumber daya saran dan prasarana pertanian	353.275.700,00	349.339.800,00	98,89
<b>JUMLAH</b>	<b>13.769.539.500,00</b>	<b>13.137.651.050,00</b>	<b>95,41</b>

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Program peningkatan kesejahteraan petani ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. Untuk mencapai sasaran program tersebut, dibuatlah beberapa kegiatan antara lain : pelatihan petani dan pelaku agribisnis; serta penilaian lomba-lomba pertanian dan penilaian lomba-lomba pertanian.

**b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**

Program ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian pangan, meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, meningkatkan mutu hasil panen, menurunkan angka kehilangan hasil, meningkatkan produktivitas lahan kering, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembangunan hortikultura, pengembangan system tunda jual di kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kegiatannya diantara pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian; pengembangan intensifikasi tanaman padi; pengembangan perbenihan/perbibitan; pengelolaan lahan dan air; serta pengembangan intensifikasi tanaman palawija.

**c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**

Adapun kegiatan dari program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan berupa promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.

**d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian**

Kegiatan dari program ini antara lain berupa peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian.

**e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**

Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan memiliki kegiatan berupa penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan; pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan; penyediaan prasarana dan sarana pengolahan lahan; serta perluasan areal pertanian.



#### **f. Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarna Pertanian**

Program ini didukung dengan kegiatan pembinaan statistik, monitoring dan evaluasi pertanian.

Peningkatan atau pencapaian yang diraih Dinas Pertanian Tanaman Pangan cukup signifikan, namun masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya ;

- 1) Tidak tersedia benih (tidak tepat waktu).
- 2) Benih belum memenuhi standar kualitas benih.
- 3) Alih fungsi lahan yang tinggi.
- 4) Produksi dan produktivitas menurun.
- 5) Kesuburan tanah rendah.
- 6) Tata Air Mikro belum baik atau sempurna.
- 7) Varietas lokal.
- 8) Tanpa olah tanah dan tanpa pemupukan.
- 9) Gangguan OPT tinggi
- 10) Alsintan terbatas (handtraktor, powerthresher).
- 11) Akses inovasi teknologi rendah
- 12) Kelembagaan petani belum berkembang.
- 13) Motivasi petani rendah.
- 14) Tenaga kerja terbatas.
- 15) Infrastruktur belum baik.
- 16) Akses permodalan yang sulit.
- 17) Harga produk yang rendah.

Beberapa langkah tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- 1) Bantuan benih tepat waktu musim tanam.
- 2) Tersedianya benih unggul yang sesuai dengan kondisi lahan.
- 3) Adanya ranperda lahan pangan pertanian berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kesuburan tanah dengan pemupukan berimbang.
- 5) Pengelolaan tata air mikro.
- 6) Menggunakan varietas unggul.
- 7) Pengolahan tanah yang optimal.
- 8) Tersedianya obat-obatan pertanian untuk mengatasi OPT
- 9) Tersedianya Alsintan
- 10) Melaksanakan pelatihan mengenai teknologi pertanian (budidaya).



- 11) Melaksanakan Gerakan Tanam Serentak Dua Kali Setahun (Gertak Tanpa Dusta) dan kegiatan Satu Kali Tanam Dua Kali Panen (Senam Dupa).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai potensi yang besar pada sektor pertanian. Untuk mendukung sektor ini, orientasi pengembangan sektor pertanian adalah : i) Mengembangkan komoditi berbasis lokal, ii) Mengembangkan sektor produksi, iii) Pengembangan kawasan sektor pertumbuhan, dan iv) Melanjutkan kebijakan Pemerintah dalam bidang Pertanian khususnya perlindungan lahan tanaman pangan berkelanjutan.

Potensi komoditi hortikultura terus berkembang, baik oleh swadaya, pemerintah daerah maupun intervensi pengembangan pemerintah. Dalam hal ini dikenal beberapa jenis komoditi diantaranya yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Komoditas jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar merupakan komoditi yang dominan pada tahun 2014. Dikaitkan dengan kondisi lahan yang sebagian besar adalah gambut, maka jenis komoditi ini dapat dikembangkan karena jenis tanaman ini memang mempunyai perakaran serabut yang dapat tumbuh lebih baik dibanding dengan jenis tanaman berakar tunggang.

**Tabel 4.55**  
Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2014(Ton)

NO	KECAMATAN	PADI	JAGUNG	KEDELAI	KACANG TANAH	KACANG HIJAU	UBI KAYU	UBI JALAR
		Produksi (ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
1	Mendahara	3	121,15	0	0	0	158,40	0
2	Mendahara Ulu	70	532,45	111,86	3,84	0	723,60	0
3	Geragai	1.169	228,72	407,52	7,64	1,17	58,24	15,12
4	Dendang	12.969	453,00	1.294,56	15,34	3,71	989,32	337,92
5	Ma. Sabak Timur	20.175	388,64	0	28,27	0	558,41	299,91
6	Ma Sabak Barat	1.499	196,64	597,10	7,47	0	130,48	38,40
7	Kuala Jambi	0	36,36	166,80	3,89	2,51	273,16	53,89
8	Rantau Rasau	15.329	174,06	4.588,58	21,79	8,44	194,86	92,27
9	Berbak	23.002	867,22	8.362,20	21,90	24,00	133,79	30,74
10	Nipah Panjang	25.980	889,98	2.499,36	6,30	0	394,17	68,27
11	Sadu	3.894	111,87	947,64	0	0	72,29	0
<b>JUMLAH</b>		104.090	4.000	18.975,62	116,44	39,83	3.686,72	936,52
<b>2013</b>		104.429	1.878,85	411,51	98,6	69,24	4.483,83	970,04
<b>2012</b>		97485	2119	631,1	74,81	73,44	5682,71	1043,39

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur



Peningkatan produksi padi tahun 2014 merupakan keberhasilan dari program gerakan serentak tanam padi dua kali setahun (GERTAK TANPA DUSTA) yang ditargetkan seluas 1.500 hektar dan teralisasi seluas 1.386 hektar (luas panen) dengan produktifitas sebesar 4,27 ton/Ha pada periode ini.

**Tabel 4.56**  
Target dan Realisasi Program Gertak Tanpa Dusta Tahun 2013-2014

Uraian	2014		
	Target	Realisasi	Produktifitas
Gertak Tanpa Dusta	1.500 Ha	1.386 Ha	4,270 ton/Ha

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur

Produktivitas tanaman padi pada tahun 2013 tertinggi di kecamatan Rantau Rasau sebesar 43,18 ton/ha, komoditi jagung di kecamatan Nipah Panjang yaitu sebesar 54,60 ton/ha, komoditi kedelai di kecamatan Berbak sebesar 19,91 ton/ha, komoditi kacang tanah di kecamatan Kuala Jambi sebesar 12,95 ton/ha, komoditi kacang hijau di kecamatan Dendang sebesar 12,36 ton/ha, komoditi ubi kayu di kecamatan Rantau Rasau sebesar 149,89 ton/ha, komoditi ubi jalar di kecamatan Kuala Jambi sebesar 76,96 ton/ha.

**Tabel 4.57**  
Luas Lahan dan Produktifitas Komoditi Pertanian Tahun 2014

NO	KECAMATAN	PADI		JAGUNG		KEDELA		KACANG TANAH		KACANG HIJAU		UBI KAYU		UBI JALAR	
		Lahan (Ha)	Produk tifitas (Ton)	Lahan (Ha)	Produk tifitas (Ton)	Lahan (Ha)	Produk tifitas (Ton)	Lahan (Ha)	Produk tifitas (Ton)	Lahan (Ha)	Produk tifitas (Ton)	Lahan (Ha)	Produk tifitas (Ton)	Lahan (Ha)	Produk tifitas (Ton)
1	Mendahara	1	26,00	27	44,87	0	0	0	0	0	0	11	144,00	0	0
2	Mendahara Ulu	23	30,30	112	47,54	7	15,98	3	12,80	0	0	50	144,72	0	0
3	Geragai	371	31,50	48	47,66	24	16,98	6	12,74	1	11,69	4	144,59	2	75,60
4	Dendang	3.275	39,60	93	48,71	72	17,98	12	12,78	3	12,36	67	147,66	44	76,80
5	Muara Sabak Timur	4.885	41,30	80	48,58	0	0	22	12,85	0	0	38	145,95	39	76,90
6	Muara Sabak Barat	503	29,80	41	47,96	35	17,06	6	12,45	0	0	9	143,98	5	76,80
7	Kuala Jambi	0	0,00	9	40,40	10	16,66	3	12,95	2	11,57	19	143,77	7	76,96
8	Rantau Rasau	3.550	43,18	35	49,73	231	19,86	17	12,82	7	12,05	13	149,89	12	76,89
9	Berbak	6.232	36,91	168	51,62	420	19,91	17	12,88	20	12	9	148,65	4	76,85
10	Nipah Panjang	6.070	42,80	163	54,60	127	19,68	5	12,59	0	0	27	145,99	9	75,86
11	Sadu	1.202	32,40	23	48,64	53	17,88	0	0	0	0	5	144,58	0	0
<b>JUMLAH</b>		26.112	39,86	799	50,06	979	18,00	91	12,79	33	12,07	252	146,30	122	76,76
<b>2013</b>		28.792	36,27	593	31,85	319	12,9	80	12,33	57	12,15	334	134,25	131	74,05
<b>2012</b>		29.832	32,68	685	3,09	474	1,33	69	1,05	62	1,18	419	13,56	120	7,61

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur





Meskipun sektor pertanian telah mencapai hasil yang menggembirakan tetapi hasil tersebut masih berkemungkinan untuk ditingkatkan baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi. Peningkatan melalui intensifikasi seperti penggunaan alat-alat pertanian yang baik dan modern.

**Tabel 4.58**  
Perkembangan, Kondisi dan Kebutuhan Alat-alat Pertanian per Tahun 2014

No	Nama alat	Total Kebutuhan Alat	2014		Total Alat yang tersedia sampai dengan Tahun 2014		Kebutuhan Tambahan
			Target	Realisasi	Baik	Rusak	
1	Handtraktor	814 unit	153 unit	153 unit	481 unit	0 unit	333 unit
2	Power Threaser	651 unit	70 unit	70 unit	322 unit	0 unit	329 unit
3	Dryer	20 unit	0 unit	0 unit	3 unit	0 unit	17 unit

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur

## 2. Dinas Peternakan

Dinas Peternakan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Peternakan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Peternakan melaksanakan 10 program dan 30 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Peternakan tertera dalam tabel 4.59 dibawah ini.

**Tabel 4.59**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Peternakan  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.033.135.928,00	1.032.214.396,00	99,91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	819.017.000,00	790.735.700,00	96,55
Program Peningkatan Disiplin Aparatur:	34.188.000,00	34.188.000,00	100,00



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	161.059.000,00	153.506.500,00	95,31
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	352.130.000,00	347.186.205,00	98,60
Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak	599.024.320,00	564.211.000,00	94,19
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	582.260.000,00	566.325.400,00	97,26
Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan	522.465.000,00	520.336.000,00	99,59
Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian	270.390.000,00	265.881.600,00	98,33
<b>JUMLAH</b>	<b>4.387.169.248,00</b>	<b>4.288.084.801,00</b>	<b>97,74</b>

Sumber : Dinas Peternakan kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Program ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan pendapatan masyarakat. dengan kegiatannya antara lain pelatihan petani dan pelaku agribisnis; penilaian lomba-lomba peternakan; serta penas KTNA.

**b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Adapun kegiatan pokoknya meliputi peningkatan mutu dan keamanan pangan; dan pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan ternak.

**c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**

Program ini bertujuan untuk mengetahui masalah peternakan, memelihara kesehatan dan mencegah penyakit menular ternak, dengan kegiatannya berupa pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.

**d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan menjaga kesehatan ternak, mendistribusikan bibit ternak kepada masyarakat serta meningkatkan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat, dengan kegiatannya antara lain pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak; dan pengembangan agribisnis peternakan.

**e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan bertujuan untuk membantu/memfasilitasi kelompok peternak dalam meningkatkan usahanya



dengan kegiatannya berupa promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah serta sarana dan prasarana pasar ternak.

**f. Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian**

Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan ternak yang ada di masyarakat, dengan kegiatannya antara lain; pembinaan statistik, monitoring dan evaluasi peternakan.

Peningkatan atau pencapaian yang diraih Dinas Peternakan cukup signifikan, namun masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya :

- 1). Masih rendah dan terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia peternak.
- 2). Masih rendahnya kualitas bibit ternak.
- 3). Masih rendahnya mutu produk hasil peternakan.
- 4). Belum memadainya sarana dan prasarana pasar ternak.
- 5). Keterbatasan modal peternak untuk mengembangkan usaha peternakan.
- 6). Masih tingginya tingkat penularan penyakit hewan menular.

Sedangkan beberapa tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- 1). Meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur dan sumberdaya peternak.
- 2). Mengoptimalkan kegiatan inseminasi buatan (IB).
- 3). Manfaatkan dan mengoptimalkan teknologi tepat guna.
- 4). Meningkatkan sarana dan prasarana pasar ternak.
- 5). Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha bagi peternak dan mendorong peran swasta dalam pembangunan peternakan.
- 6). Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan.

Dari kinerja sektor Peternakan selama 4 tahun terakhir ini menunjukkan pengembangan populasi ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal ini seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.60**  
Perkembangan Ternak Menurut Jenis, 2011-214

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Itik
<b>2011</b>	13.327	178	32.378	115	621.988	30.860
<b>2012</b>	14.703	187	38.742	116	996.971	36.890
<b>2013</b>	12.268	107	34.743	143	1.707.709	44.859
<b>2014*</b>	14.456	89	39.991	99	2.510.563	42.841
<b>Pertumbuhan 2013-2014 (%)</b>	<b>17,84</b>	<b>-16,82</b>	<b>15,11</b>	<b>-30,77</b>	<b>47,01</b>	<b>-4,50</b>

\*) Angka Sementara

Sumber : Dinas Peternakan kab. Tanjung Jabung Timur



### 3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 9 program dan 41 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tertera dalam tabel 4.61 dibawah ini.

**Tabel 4.61**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.107.495.400,00	2.047.713.600,00	97,16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.737.841.000,00	1.696.902.160,00	97,64
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	53.700.000,00	53.450.000,00	99,53
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	41.116.000,00	34.468.900,00	83,83
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	304.325.000,00	255.796.300,00	84,05
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.837.480.500,00	2.626.916.625,00	92,58
program peningkatan penerapan teknologi pertanian	70.380.000,00	63.685.000,00	90,49
program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	70.125.000,00	56.980.000,00	81,25



Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	813.224.188,00	752.909.700,00	92,58
<b>JUMLAH</b>	<b>8.035.687.088,00</b>	<b>7.588.822.285,00</b>	<b>94,44</b>

Sumber : BP4K kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Program peningkatan kesejahteraan petani bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan dan peningkatan akses petani terhadap sumberdaya usaha pertanian. dengan kegiatannya berupa penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis; peningkatan kemampuan lembaga petani; penas KTNA; operasional UPTB BP3K kecamatan sadu; operasional UPTB BP3K kecamatan nipah panjang; operasional UPTB BP3K kecamatan rantau rasau; operasional UPTB BP3K kecamatan berbak; operasional UPTB BP3K kecamatan muara sabak timur; operasional UPTB BP3K kecamatan muara sabak barat; operasional UPTB BP3K kecamatan dendang; operasional UPTB BP3K kecamatan geragai; operasional UPTB BP3K kecamatan mendahara ulu; operasional UPTB BP3K kecamatan mendahara; operasional UPTB BP3K kecamatan Kuala jambi serta pemberdayaan kelembagaan penyuluhan..

**b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian**

Program ini sebagai upaya peningkatan hasil pertanian secara intensifikasi, adapun kegiatan yang mendukung program ini berupa pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

**c. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan**

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

**d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan PKS (Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap) baik bagi penyuluh maupun petani dengan kegiatannya antara lain peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan; penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan; serta pemberdayaan komisi penyuluh kabupaten.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan saat ini :

- 1) Keterbatasan sumberdaya manusia penyuluh baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
- 2) Sarana dan prasarana serta kelengkapan yang belum memadai.



Beberapa langkah tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- 1) Pengusulan penambahan pegawai serta mengikutsertakan aparatur BP4K dan penyuluh dalam berbagai pendidikan maupun pelatihan.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan program.
- 3) Mengoptimalkan kinerja pegawai dengan menerapkan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Sampai dengan tahun 2014, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 108 orang penyuluh yang terdiri dari penyuluh PNS sebanyak 45 orang atau 41,67 %, penyuluh swadaya sebanyak 60 orang atau 55,56 % dan sisanya sebanyak 3 orang atau 2,78% merupakan tenaga bantuan pemerintah pusat.

**Tabel 4.62**  
Jumlah Penyuluh dan Status Penyuluh per Kecamatan Tahun 2014

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENYULUH	STATUS PENYULUH		
			PNS	SWADAYA	THL- TBPP
1	Mendahara	9	4	5	0
2	Mendahara Ulu	9	5	4	0
3	Geragai	10	6	4	0
4	Dendang	9	2	6	1
5	Muara Sabak Timur	14	7	7	0
6	Muara Sabak Barat	8	3	5	0
7	Kuala Jambi	8	3	5	0
8	Rantau Rasau	10	4	4	2
9	Berbak	8	2	6	0
10	Nipah Panjang	13	6	7	0
11	Sadu	10	3	7	0
	Koordinator Penyuluh	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>108</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>3</b>

Sumber : BP4K kab. Tanjung Jabung Timur

Selain penyuluh, perkembangan bidang penyuluhan tahun 2010-2014 juga dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

**Tabel 4.63**  
Perkembangan Bidang Penyuluhan Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	Pos Penyuluh	6 unit	11 unit	8 unit	6 unit
2	Poktan	1.119 kelompok	1.159 kelompok	1.159 kelompok	1.159 kelompok
3	Gapoktan	93 kelompok	93 kelompok	93 kelompok	93 kelompok

Sumber : BP4K kab. Tanjung Jabung Timur



#### 4. Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 5 program dan 29 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Ketahanan Pangan tertera dalam tabel 4.64 dibawah ini.

**Tabel 4.64**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Ketahanan Pangan  
Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.098.757.600,00	1.036.485.619,00	94,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	775.080.000,00	731.660.984,00	94,40
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.300.000,00	13.300.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	11.450.000,00	76,33
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1.770.296.900,00	1.651.232.540,00	93,27
<b>JUMLAH</b>	<b>3.672.434.500,00</b>	<b>3.444.129.143,00</b>	<b>93,78</b>

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur

Program yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan adalah **program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)**, program ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian pangan, meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, meningkatkan mutu hasil panen, menurunkan angka kehilangan hasil, meningkatkan produktivitas lahan kering, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembangunan hortikultura, pengembangan system tunda jual di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun kegiatan pokok



diantaranya penanganan daerah rawan pangan; pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; pengembangan cadangan pangan daerah; pengembangan desa mandiri pangan; pengembangan lumbung pangan desa; peningkatan mutu dan keamanan pangan; pameran ketahanan pangan tingkat nasional dan provinsi; koordinasi perumusan program ketahanan pangan; penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat; serta penilaian lomba-lomba ketahanan pangan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Ketahanan Pangan dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2014 antara lain:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pemantauan yang dilakukan, mengingat masih terbatasnya kapasitas SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana serta dana yang menunjang.
- 2) Kurang teraplikasi dan terimplikasinya hasil rekomendasi dokumen keamanan dan mutu pangan serta ketentuan yang direkomendasikan karena dirasakan masih kurangnya sosialisasi dan frekuensi pemantauan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- 3) Masih kurang dimanfaatkannya sistem informasi ketahanan pangan oleh sebagian aparatur, masih lemahnya minat baca untuk menguasai segala peraturan perundangan yang berlaku di bidang pangan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kinerja aparatur.
- 4) Dirasakan masih rendahnya kesadaran, pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang ketahanan pangan terutama Penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu pangan.
- 5) Seluruh instansi terkait relatif masih belum mengetahui secara jelas tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6) Dari 9 (sembilan) indikator Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang ada saat ini, beberapa diantaranya masih dirasakan sangat minim atau terbatas, seperti prasarana penghubung jalan dan jembatan, akses terhadap listrik, akses air bersih dan juga kondisi daerah yang sebagian besar lahan gambut yang menyebabkan masalah ketahanan dan kerentanan pangan di wilayah pedesaan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan solusi sebagai berikut :

- 1) Mengikutsertakan aparat Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam berbagai pelatihan dan kesempatan yang diadakan oleh instansi yang berwenang, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur untuk kemudian dapat





menumbuhkan motivasi, inovasi dan kreativitas staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam peningkatan ketahanan pangan kabupaten.

- 2) Mengadakan gerakan promosi produk pangan lokal, lomba, penyuluhan, pembinaan dan penyebaran informasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga diharapkan dengan kegiatan ini akan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan kabupaten.
- 3) Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan tingkat pusat, instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, utamanya dalam peningkatan ketahanan pangan untuk menyamakan persepsi, memfokuskan dan menajamkan program dengan mempertimbangkan skala prioritas.
- 4) Terus menjaga dan memelihara inventarisasi sarana dan prasarana yang ada serta mengusulkan kelengkapannya terutama untuk ruang pertemuan, kendaraan operasional (lapangan) untuk mendukung kelancaran operasional pembinaan dan koordinasi ke Kabupaten/Kota.
- 5) Bantuan pembangunan infrastruktur prasarana penghubung, akses listrik dan air bersih, baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta dari pihak lainnya, seperti bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pada Tahun 2014, Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan 11 program dan 35 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertera dalam tabel 4.65 dibawah ini.

**Tabel 4.65**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1.726.932.000,00	1.712.912.200,00	99,19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.027.872.000,00	849.346.650,00	82,63
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	596.139.697,00	545.049.400,00	91,43
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	251.980.000,00	218.088.387,00	86,55
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.260.000,00	31.260.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	332.000.000,00	330.720.000,00	99,61
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	949.500.000,00	898.885.000,00	94,67
program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	61.113.242,00	60.050.000,00	98,26
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	503.023.000,00	490.630.000,00	97,54
<b>JUMLAH</b>	<b>5.549.319.939,00</b>	<b>5.206.441.637,00</b>	<b>93,82</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) mempunyai beberapa kegiatan diantaranya pengembangan kawasan dan peningkatan usaha masyarakat dibidang perkebunan; dan pengelolaan lahan dan air dan pengelolaan lahan dan air.

**b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**

Program ini ditunjang dengan kegiatan berupa pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan; dan pengembangan/peremajaan kebun kelapa rakyat serta pembuatan demplot singkong gajah.

**c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**



Program ini bertujuan untuk mengkoordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan dengan terlaksananya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, dengan kegiatannya antara lain pengadaan bibit tanaman kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; serta pemeliharaan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2013 (T+1).

**d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan**

Kegiatan dari program ini diantaranya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; pengamanan dan perlindungan hutan dan peredaran hasil hutan; pengendalian hama tanaman perkebunan; pembuatan demplot tanaman mangrove; serta pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

**e. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan**

Program ini bertujuan untuk pembinaan, penertiban dan pengawasan eksploitasi hasil hutan, adapun program ini ditunjang oleh kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi serta tertib usaha kehutanan.

**f. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan**

Kegiatan dari program ini diantaranya pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; pengelolaan data statistik dan monitoring; monitoring dan evaluasi kegiatan kehutanan dan perkebunan; penanaman tanaman penghijauan lokasi sekitar komplek perkantoran; serta penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai Tahun 2014 dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Kurang respon dari pemilik kebun terhadap ketentuan penilaian izin perkebunan, tergambar dari tidak memberikan laporan secara rutin kepada Dinas terkait, hal ini dapat menyulitkan dalam monitoring dan evaluasi perkembangan usaha perkebunan.
- 2) Di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berdiri pabrik kelapa sawit (PKS) hal ini mengakibatkan harga jual TBS di petani sangat rendah, karena biaya transportasi dari petani ke PKS yang berada diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadikan cost dibebankan terhadap total standar harga TBS yang telah ditentukan.



- 3) Dibeberapa wilayah tanaman kelapa dalam masih dijumpai intrusi air laut yang mengakibatkan tanaman kelapa dalam sangat terganggu pertumbuhannya dan produksi buah kelapa .
- 4) Harga jual kelapa dalam ditingkat petani relatif rendah karena belum adanya industri pengolahan kelapa dalam secara terpadu dalam skala industri.
- 5) Masih banyak terdapat lahan masyarakat yang belum dimanfaatkan karena lahan tersebut merupakan lahan gambut yang sifatnya asam sehingga perlu pemilihan komoditi tanaman yang sesuai dengan kondisi tersebut.
- 6) Batas fisik kawasan hutan dengan lahan masyarakat masih banyak yang tidak jelas di lapangan, hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik pemanfaatan kawasan lahan hutan.
- 7) Masih sering terjadi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat serta mengakibatkan kerugian fisik secara signifikan. Dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan, sangat sulit dilaksanakan karena peralatan pemadam kebakaran sangat terbatas, personil sangat kurang dan lokasi kebakaran sulit dijangkau.
- 8) Sulitnya akses untuk melakukan rehabilitasi hutan lindung gambut bekas terbakar sehingga memerlukan biaya yang sangat besar.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

- 1) Dilakukan sosialisasi penilaian usaha perkebunan sesuai dengan Permentan No. 98 tahun 2013 dan mewajibkan pada perusahaan melaporkan perkembangan usaha perkebunan.
- 2) Mengupayakan investor untuk membangun pabrik kelapa sawit (PKS), melalui penyampaian data tentang ketersediaan kebun kelapa sawit milik masyarakat serta perusahaan yang akan mendukung pasokan terhadap PKS yang akan dibangun.
- 3) Sangat diperlukan pengembangan tata air mikro (TAM).
- 4) Perlu mengkaji komoditi yang sesuai/cocok pada lahan gambut/asam, saat ini sedang dikembangkan tanaman singkong gajah (*elephant cassava*) dan komoditi lainnya.
- 5) Menginventarisasi batas fisik kawasan hutan yang cenderung/rawan terjadinya konflik, dengan melakukan Rekonstruksi Batas.
- 6) Perlu pengadaan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kondisi lahan gambut serta pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda



4 (empat) yang memadai serta melaksanakan pelatihan personil yang berasal dari PNS maupun masyarakat.

- 7) Pengembangan tanaman unggulan Kab. Tanjung Jabung Timur diantaranya jenis jelutung (*Dyera sp*) di lahan masyarakat dan kawasan hutan.

Luas areal lahan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014 seluas **203.718,98** hektar. Adapun komposisi dari luas tersebut masing-masing adalah 4.129,60 hektar atau 2,03 % dari kawasan hutan merupakan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau Pantai Timur, 116.604,80 hektar atau 57,24 % dari kawasan hutan merupakan kawasan Taman Nasional Berbak, 2.677,63 hektar atau 1,31 % merupakan kawasan pelestarian Tahura sekitar Tanjung, 24.288,33 hektar atau 11,92 % merupakan hutan lindung gambut, 4.686,75 hektar atau 26,84 % merupakan hutan produksi tetap, dan 1.334,87 hektar atau 0,66 % merupakan hutan produksi konservasi.

**Tabel 4.66**  
Luas Hutan Menurut Kawasan Tahun 2014

NO	JENIS HUTAN/KAWASAN	Luas (Ha)	%
1	Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau Pantai Timur	4.129,60	2,03
2	Taman Nasional Berbak	116.604,80	57,24
3	Kawasan Pelestarian Tahura sekitar Tanjung	2.677,63	1,31
4	Hutan Lindung Gambut	24.288,33	11,92
5	Hutan Produksi Tetap	54.686,75	26,84
6	Hutan Produksi Konservasi	1.334,87	0,66
	<b>J U M L A H</b>	<b>203.718,98</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Tanjung Jabung Timur

Kondisi lahan di Tanjung Jabung Timur yang sangat spesifik dengan lahan gambutnya telah menciptakan kawasan hutan yang sebagian besar telah dilindungi melalui perangkat hukum. Aktivitas pembangunan kehutanan dilaksanakan dengan menyediakan bibit dan pembuatan drainase. Disamping itu dilaksanakan juga pembangunan kehutanan dengan pola perhutanan rakyat yang dimaksudkan agar masyarakat dapat secara aktif membantu pelestarian hutan. Dengan terlaksananya program di bidang kehutanan diharapkan agar masyarakat memperoleh keuntungan dari kegiatan pelestarian hutan. Sesuai dengan itu keberadaan TNB (Taman Nasional Berbak) dan Hutan Lindung Gambut serta Cagar Alam Mangrove merupakan tipe hutan yang harus dilestarikan sepanjang masa mengingat fungsi ekologisnya yang demikian dominan tidak saja untuk kehidupan di tingkat lokal, akan tetapi sampai ke tingkat global.



Dengan mempertimbangkan secara seksama kondisi hutan lindung di Tanjung Jabung Timur maka orientasi kegiatan tahun 2014 diperuntukkan guna pelestarian dengan cara melibatkan masyarakat seoptimal mungkin, termasuk juga pelibatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Selain itu perlu upaya peningkatan nilai tambah agroindustri yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian wilayah ini.

Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat beberapa komoditi, yaitu karet, sawit, kelapa dalam, pinang, lada, kakao, kelapa hibrida. Dari komoditi tersebut produksi kepala dalam merupakan unggulan pertama dan disusul dengan produksi sawit. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.67 berikut :

**Tabel 4.67**  
Perkembangan Komoditi Perkebunan Tahun 2012-2014

Komoditi	2013			2014		
	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Petani (KK)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Petani (KK)
Karet	7.750	2.673	5.264	7.750	2.842	5.264
Kelapa Sawit	27.201	35.135	9.226	31.210	42.441	9.198
Kelapa Dalam	58.620	50.254	22.848	58.650	51.013	2.284
Kelapa Hibrida	69	49	45	69	59	45
Lada	59	7	794	54	11	784
Kakao	355	126	673	357	167	677
Pinang	8.846	5.793	8.390	8.846	6.149	8.390
Kopi Robusta	3.259	1.027	2.456	3.259	1.053	2.456
Kemiri	9	2	31	9	3	31

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Tanjung Jabung Timur

Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2014 telah merealisasikan bantuan bibit tanaman perkebunan sebanyak 6 komoditi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.68**  
Realisasi Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Tahun 2013-2014

NO	KOMODITI	2013		2014	
		REALISASI		REALISASI	
		Σ Bibit (buah/batang)	Luas Lahan (Ha)	Σ Bibit (buah/batang)	Luas Lahan (Ha)
1	Karet	11.875	25,00	22.500	45
2	Lada	7.000	11,60	-	-
3	Pinang	-	-	3.000	4
4	Kakao	6.000	6,20	3.000	4
5	Kelapa Dalam	-	-	40.430	311
6	Kopi	9.000	12,00	12.000	16



<b>JUMLAH</b>	<b>33.875</b>	<b>54,80</b>	<b>80.930</b>	<b>380</b>
---------------	---------------	--------------	---------------	------------

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Tanjung Jabung Timur

## 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan 8 program dan 40 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tertera dalam tabel 4.69 dibawah ini.

**Tabel 4.69**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Dinas Energi Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2014

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	898.135.000,00	854.369.957,00	95,13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	226.500.000,00	226.183.000,00	99,86
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000.000,00	13.400.000,00	89,33
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.000.000,00	104.335.000,00	99,37
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	188.650.000,00	188.290.300,00	99,81
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	818.077.000,00	805.488.420,00	98,46
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	16.967.998.000,00	16.757.727.400,00	98,76
Program Pengembangan dan Rekayasa Sumber Daya Mineral	381.380.000,00	289.180.250,00	75,82
<b>JUMLAH</b>	<b>19.600.740.000,00</b>	<b>19.238.974.327,00</b>	<b>98,15</b>



Sumber : Dinas ESDM kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan**

Program ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan dan pengawasan sumber daya bidang pertambangan yang ditunjang dengan kegiatan diantaranya koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan; pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galin C; pembuatan peta wilayah pertambangan; pengawasa kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi; pembuatan data base pertambangan; pemetaan sumur migas secara digitasi; serta penyusunan perda transparansi migas.

**b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**

Program ini bertujuan untuk pengembangan/perluasan jaringan listrik pedesaan, koordinasi pengembangan ketenagalistrikan serta perencanaan jaringan listrik pedesaan, yang ditunjang dengan kegiatan diantaranya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan; pengadaan alat-alat jaringan dan listrik; pembangunan pengembangan jaringan listrik kecamatan gerakai; pembangunan pengembangan jaringan listrik kecamatan Muara Sabak Barat; perencanaan ketenagalistrikan; pembangunan pengembangan jaringan listrik kecamatan nipah panjang; pembangunan pengembangan jaringan listrik kecamatan kuala jambi; pemeliharaan dan pengawasan jaringan listrik; pembangunan pengembangan jaringan listrik kecamatan muara sabak timur; pembangunan pengembangan jaringan listrik kecamatan sadu; serta pembangunan pengembangan jaringan listrik kecamatan rantau rasau.

**c. Program Pengembangan dan Rekayasa Sumber Daya Mineral**

Kegiatan dari program ini berupa inventarisasi sumber daya mineral; dan penentuan potensi air bawah tanah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tentunya ada permasalahan yang dihadapi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadapi permasalahan dilapangan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2. Belum terpenuhinya formasi berdasarkan disiplin ilmu
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih kurang.
4. Tegangan listrik masih rendah
5. Sulitnya melakukan pembebasan tanah dan tanaman tumbuh





6. Pelaku usaha dibidang pertambangan belum sepenuhnya paham tentang perizinan di bidang pertambangan
7. Sulitnya mendapat data pertambangan migas.
8. Kegiatan kajian akademis pembuatan Perda Air Bawah Tanah tidak dapat dilaksanakan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi system, tatakelola dan urusan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah tersebut meliputi urusan ESDM sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.

Adapun solusi yang telah dilakukan untuk minimalis permasalahan tersebut diantaranya :

1. Wilayah kecamatan atau desa yang belum tersentuh SIS dalam 10 tahun kedepan yang dikarenakan kendala teknis akan dibantu PLTS melalui program dari Dinas ESDM Provinsi Jambi.
2. Dengan dibangunnya gardu induk di kabupaten Tanjung Jabung Timur akan meningkatkan daya sehingga terpenuhi kebutuhan listrik di daerah yang tegangan listriknya rendah.
3. Pendekatan dengan masyarakat yang terkena langsung pembangunan jaringan listrik secara kekeluargaan.
4. Koordinasi yang intens dengan Dinas ESDM Provinsi Jambi dan PT. PLN baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Melakukan updating data pertambangan migas.
6. Perda Air bawah tanah akan dilaksanakan tahun 2015.

Potensi Pertambangan di Tanjung Jabung Timur demikian dominan, ini dapat dilihat perannya sebagai kontributor utama dalam PDRB sampai pada Tahun 2012. Dalam kaitan ini dapat dilihat dua perusahaan asing yaitu PETRONAS dari Malaysia dan PETRO CHINA dari China yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas dan minyak bumi di wilayah ini. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki cadangan minyak bumi  $\pm 250$  juta Barrel sedangkan gas alam cair potensinya 2 Milyard Feed Qubic Gas sebagai potensi sumber daya non hayati. Untuk periode Desember 2011 sampai dengan November 2013 lift minyak bumi Petrochina Jabung Ltd. mencapai 1.653.570 barrel atau rata-rata per hari  $\pm 4.593$  barrel. Sedangkan lifting gas bumi Petrochina Jabung Ltd. tahun 2013 mencapai 26.370.100 MMBTU.



Sebagai upaya pencapaian rasio 75/100 electricity pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pencapaian pembangunan millenium (*Millenium Development Goal's*). Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas EDSM sampai dengan tahun 2013 telah berhasil mencapai *Rasio electricity* untuk kecamatan sebesar 100 %, untuk desa / kelurahan 79 %, sedangkan untuk rumah tangga 75 %.

Tabel 4.70

Capaian Bidang Sumber Daya Mineral dan Ketenagalistrikan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2012		2013		2014	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
I	<b>BIDANG SUMBER DAYA MINERAL</b>						
1	Lifting minyak bumi	1.333.420 barrel	1.333.420 barrel	1.821.370 barrel	1.653.570 barrel	1.825.250 barrel	1.027.920 barrel
2	Lifting Gas Bumi	29.043.620 MMBTU	29.043.620 MMBTU	23.295.920 MMBTU	26.370.100 MMBTU	33.246.800 MMBTU	17.473.410 MMBTU
II	<b>BIDANG KETENAGALISTRIKAN</b>						
1	Ratio Electricity Kecamatan	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%	100,00%	100,00%
2	Ratio Electricity Desa/Kelurahan	61%	61%	65,00%	71,00%	77,00%	79,00%
3	Ratio Electricity Rumah Tangga	61%	62%	70,00%	74,00%	74,00%	75,00%
4	PLTS	1 unit : PLTS terpusat (60 KK) di desa Rawasari Kec. Rantau Rasau	1 unit : PLTS terpusat (60 KK) di desa Rawasari Kec. Rantau Rasau	-	-	2 unit : PLTS terpusat di Pulau burung kec. Nipah Panjang dan Desa Sungai Benuh kec. Sadu	-

Sumber : Dinas ESDM kab. Tanjung Jabung Timur

## 7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga melaksanakan 14 program dan 39 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga tertera dalam tabel 4.71 dibawah ini.

**Tabel 4.71**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	121.100.000,00	117.800.000,00	97,27
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.315.001.060,00	1.289.696.500,00	98,08
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	867.789.750,00	848.269.250,00	97,75
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	73.612.700,00	67.560.700,00	91,78
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.081.974.000,00	998.062.500,00	92,24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	3.000.364.940,00	2.930.942.900,00	97,69
program komite olahraga nasional (KONI) kab.tanjabt timur	2.540.000.000,00	1.754.950.500,00	69,09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	848.997.000,00	826.098.468,00	97,30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	152.990.000,00	144.465.300,00	94,43
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40.000.000,00	12.650.000,00	31,63
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	88.400.000,00	87.753.950,00	99,27
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	594.424.182,00	507.254.182,00	85,34
Program pengembangan kemitraan	35.000.000,00	34.900.000,00	99,71
<b>JUMLAH</b>	<b>10.778.403.632,00</b>	<b>9.639.154.250,00</b>	<b>89,43</b>

Sumber : Dinas Budparpora kab. Tanjung Jabung Timur



**a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Program ini bertujuan meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (*tangible*) maupun tidak kasat mata (*intangible*). dengan kegiatan antara lain pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air; dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

**b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

Program ini bertujuan menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik di daerah. dengan kegiatan berupa pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah; fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah; serta festival budaya tepian sungai bumi melayu.

**c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

Bertujuan untuk Meningkatkan peran lembaga kepemudaan dalam pengembangan pemuda. dengan kegiatan antara lain seleksi dan pelatihan paskibraka; pembinaan kepemudaan; pembinaan organisasi kwartir cabang gerakan pramuka kab. Tanjabtim.

**d. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**

Program ini didukung oleh kegiatan berupa penunjang pelaksanaan program SP-3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur; serta seleksi kegiatan kepemudaan.

**e. Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olahraga**

Program pembinaan dan perasyarakatan olah raga bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan olah raga kepada masyarakat. dengan kegiatan berupa pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah; pembinaan olahraga tradisional; serta pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.

**f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga dengan kegiatan berupa peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga; pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga; serta rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga.



**i. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik di dalam maupun diluar negeri; serta pengembangan teknologi informasi pemasaran pariwisata.

**j. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata melalui kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

**k. Program Pengembangan Kemitraan**

Dalam pengembangan sektor kepariwisataan diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, stakeholder maupun masyarakat untuk di program ini dilaksanakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang pariwisata. Hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut antara lain:

- 1). Rendahnya kualitas produk pariwisata
- 2). Rendahnya pemberdayaan masyarakat disekitar obyek wisata
- 3). Rendahnya kualitas dankuantitas pemasaran

Solusi dari permasalahan tersebut adalah mengarahkan anggaran yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Nilai sosial budaya yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat lokal merupakan aset pembangunan yang tidak terperikan nilainya. Sedang atraksi budaya dan objek wisata merupakan modal dasar untuk pengembangan perekonomian kerakyatan dimasa mendatang. Berbagai atraksi dan objek wisata yang perlu dikelola dan dikembangkan diantaranya adalah Taman Nasional Berbak, Mandi Syafar, dan Makam Orang Kayo Hitam.

Pengembangan pariwisata di daerah lebih efektif jika dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Provinsi, dengan melibatkan para pihak terkait serta dibantu sepenuhnya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Langkah awal bisa dicoba melalui kerjasama pariwisata pengembangan "*sister city dibidang Pariwisata*" dengan Daerah/Kota yang sudah maju pariwisatanya.

Sementara itu Lembaga Adat Melayu yang ada saat ini harus senantiasa mampu mengikuti perkembangan dan memapah dinamika kehidupan masyarakat. Untuk itu bangunan lembaga adat berikut perangkat organisasinya yang ada saat ini



seyogyanya dapat difungsikan dan dikembangkan secara lebih maksimal. Sedangkan untuk perkembangan dibidang olah raga masih perlu ditingkatkan lagi, baik sarana dan perlengkapan maupun prestasi para atlet.

**Tabel 4.72**  
Capaian Kinerja Pariwisata Tahun 2014

NO	URAIAN	CAPAIAN 2013	TARGET 2014	REALISASI 2014	%
1	Kunjungan wisata domestik (org)	5.489	10.344	10.344	100
2	Kunjungan wisata manca negara (org)	38	41	41	100
3	Jumlah kawasan wisata dengan sarana prasarana yang memadai(Buah)	10	11	11	100
4	Jumlah penginapan dan home stay (Buah)	7	7	7	100
5	Jumlah even promosi pariwisata (even)	8	4	1	25

Sumber : Dinas Budparpora kab. Tanjung Jabung Timur

Berikut tabel perkembangan seni, budaya dan olahraga Tahun 2014 menurut kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Tabel 4.73**  
Capaian Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan  
Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014

NO	Kecamatan	2014			
		Jumlah grup kesenian	Jumlah gedung kesenian	Jumlah klub olahraga	Jumlah gedung olahraga
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	7	1		1
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	5	1		2
3	Kecamatan Mendahara	4	0		3
4	Kecamatan Mendahara Ulu	1	0		0
5	Kecamatan Geragai	3	0		0
6	Kecamatan Dendang	2	0		0
7	Kecamatan Kuala Jambi	4	0		2
8	Kecamatan Sadu	1	0		1
9	Kecamatan Nipah Panjang	2	0		2
10	Kecamatan Berbak	1	0		0
11	Kecamatan Rantau Rasau	18	0		1
<b>JUMLAH</b>		<b>48</b>	<b>2</b>	<b>272</b>	<b>12</b>
<b>2013</b>		<b>48</b>	<b>13</b>	<b>nn</b>	<b>12</b>

Sumber : Dinas Budparpora kab. Tanjung Jabung Timur

## 8. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan



Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 10 program dan 35 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kelautan dan Perikanan tertera dalam tabel 4.74 dibawah ini.

**Tabel 4.74**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.148.116.000,00	1.091.990.625,00	95,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	238.600.000,00	231.370.750,00	96,97
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	29.150.000,00	29.150.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	#DIV/0!
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	72.700.000,00	71.617.500,00	98,51
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	29.549.837.640,00	29.518.390.950,00	99,89
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	1.320.870.000,00	1.292.160.000,00	97,83
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	190.750.000,00	189.418.000,00	99,30
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	6.038.971.500,00	5.953.967.855,00	98,59
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.215.111.000,00	1.166.496.250,00	96,00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.673.200.000,00	1.647.884.700,00	98,49
<b>JUMLAH</b>	<b>41.477.306.140,00</b>	<b>41.192.446.630,00</b>	<b>99,31</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur



**a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. dengan kegiatannya berupa pemberian bantuan paket perikanan; pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir; peningkatan sarana dan prasarana ekonomi.

**b. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat dalam pengamanan pemanfaatan sumberdaya laut. dengan kegiatannya berupa pembinaan kelompok masyarakat swakarsa dan pengawasan dan pengendalian SDI.

**c. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya laut secara bertanggung jawab, serta penegakkan hukum terhadap pencurian dan pengrusakan sumberdaya laut. dengan kegiatannya berupa penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut .

**d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan bibit ikan unggul dengan menyempurnakan Balai Benih Ikan, menyediakan sarana/prasarana operasional Balai Benih Ikan dan Tambak Dinas, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan dan pembinaan serta pengembangan perikanan. Kegiatan pokoknya berupa pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan; pengembangan budidaya keramba dan tambak/kolam; dan biaya operasional BBI.

**e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan hasil perikanan tangkap baik melalui pengembangan teknologi maupun sumber daya manusia, adapun kegiatan antara lain pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap; serta biaya operasional PPI kecamatan.



**f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemasaran ikan sehingga nelayan mendapat jaminan pasca melaut. Kegiatan ini didukung oleh kegiatan kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; pengujian bahan kimia berbahaya terhadap mutu produk perikanan; peningkatan sarana pengolahan dan pemasaran serta pengembangan distribusi pasar; serta operasi pabrik es dan cold storage.

Terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang kelautan dan perikanan. Hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut antara lain:

- 1). Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat penerima bantuan.
- 2). Biaya operasional yang telah disalurkan kepada masyarakat digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
- 3). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sehingga pemanfaatan wilayah pesisir kurang berwawasan lingkungan, masyarakat masih menggunakan bahan/alat tangkap yang merusak lingkungan (desktruktif).
- 4). Penanganan masalah pelanggaran hukum baik perizinan, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang belum memadai.

Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dalam menanggulangi masalah-masalah dibidang kelautan dan perikanan, perlu mempertimbangkan agar dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan kerjasama yang baik dan sinergi antar nelayan, petugas lapangan (Tenaga penyuluh perikanan dan Pokmaswas).
- 2). Mengalokasikan anggaran sesuai dengan kondisi sebenarnya dan menyeleksi permintaan masyarakat secara ketat dan berjenjang.
- 3). Penataan ruang, pemberdayaan masyarakat dan pengendalian sumber daya ikan.

Dengan luas wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki potensi ekonomis di sektor perikanan sampai dengan tahun 2014 menghasilkan produksi ikan sebagaimana tabel 4.75 :



**Tabel 4.75**  
Perkembangan Produksi Ikan Menurut Sub Sektor  
Di Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2014

NO	SUB SEKTOR	2011	2012	2013	2014
1	Perairan Laut	23.118 ton	23.678 ton	25.430 ton	24.964,5 ton
2	Perairan Umum	671 ton	678,7 ton	685 ton	859,8 ton
3	Kolam	239 ton	274 ton	300 ton	108,0 ton
4	Tambak	397 ton	496 ton	512 ton	308,1 ton
5	Kerambah Jaring Apung (KJA)	82 ton	176 ton	200 ton	550,0 ton
<b>J U M L A H</b>		<b>24.507,00 ton</b>	<b>25.302,70 ton</b>	<b>27.127,00 ton</b>	<b>26.790,40 ton</b>
6	Benih Ikan	180.000 ekor	210.000 ekor	240.000 ekor	476.239 ekor

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyadari akan potensi perikanan di kabupaten ini dan kondisi kesejahteraan nelayan memberikan bantuan kapal nelayan (pompong) berikut alat tangkapnya. Tahun 2014 telah didistribusikan sebanyak 539 unit pompong sehingga total pompong yang telah didistribusikan sebanyak 1.744 unit ditambah 22 unit ukuran 0,3 gt.

**Tabel 4.76**  
Target dan Realisasi Bantuan Kapal Nelayan (Pompong)  
per Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2014

NO	KECAMATAN	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	PERSENTASE
1	Mendahara	70	80	114,29
2	Mendahara Ulu	0	0	0,00
3	Geragai	0	0	0,00
4	Dendang	0	0	0,00
5	Muara Sabak Timur	70	100	142,86
6	Muara Sabak Barat	0	0	0,00
7	Kuala Jambi	80	109	136,25
8	Rantau Rasau	0	0	0,00
9	Berbak	0	0	0,00
10	Nipah Panjang	90	122	135,56
11	Sadu	90	128	142,22
<b>JUMLAH</b>		400	539	134,75
<b>2013</b>		550	725	131,82
<b>2012</b>		550	480	87,27
<b>TOTAL</b>		1.500	1.744	116,27

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur



## 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada Tahun 2014, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 13 program dan 42 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertera dalam tabel 4.77 dibawah ini.

**Tabel 4.77**  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2014

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	375.829.500,00	362.353.000,00	96,41
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	1.884.048.441,00	1.365.246.412,00	72,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	629.192.500,00	602.833.387,00	95,81
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193.650.000,00	187.046.840,00	96,59
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.000.000,00	21.040.000,00	91,48
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	8.000.000,00	80,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	170.785.000,00	160.812.800,00	94,16
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	64.750.000,00	59.281.300,00	91,55
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	332.985.000,00	293.422.400,00	88,12
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	360.775.000,00	330.331.000,00	91,56
Program Penataan Struktural Industri	154.775.000,00	138.177.970,00	89,28



Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensi	32.800.000,00	31.304.000,00	95,44
program pemantapan, pengembangan tata kelola dekranasda	403.990.000,00	354.961.660,00	87,86
<b>JUMLAH</b>	<b>4.636.580.441,00</b>	<b>3.914.810.769,00</b>	<b>84,43</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur

**a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Program ini bertujuan untuk mendorong pemberdayaan dan perlindungan industri dalam negeri, serta pengawasan barang beredar. Adapun kegiatan dari program ini berupa peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa; operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah; sosialisai perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan serta operasi pasar.

**b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan. kegiatan pokoknya berupa pengembangan pasar dan distribusi barang/produk; temu usaha misi dagangan dan pasar lelang agro; pembukaan outlet kabupaten Tanjung Jabung Timur; bazar pasar murah; pembangunan pasar sehat tradisional; serta sosialisasi distribusi barang-barang bersubsidi serta pembinaan pelaku usaha perdagangan.

**c. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**

Program ini ditujukan untuk mendorong daya saing dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem produksi serta peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industri dan peningkatan sinergi antar berbagai elemen sistem inovasi, dengan kegiatan diantaranya koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi.

**d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Tujuan program ini adalah mewujudkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai basis pengembangan industri regional, dengan kegiatan pokoknya berupa pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri; pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah; dan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.

**e. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

Program ini dimaksudkan untuk penyerapan dan penerapan teknologi budidaya, produksi dan kemasan untuk meningkatkan daya saing komoditi



andalan di pasaran dengan kegiatan berupa pembinaan kemampuan teknologi industri.

**f. Program Penataan Struktur Industri**

Tujuan program ini adalah untuk memperkuat dan memperbaiki struktur industri baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi untuk industri hilir, dengan kegiatan berupa penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.

**g. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial**

Program ini ditunjang kegiatan pokok berupa pembinaan dan pengawasan sentra-sentra potensial.

**h. Program Pemantapan, Pengembangan Inovasi dan Kreasi Produk Kerajinan**

Program ini didukung oleh kegiatan pembinaan dan pemantapan tata kelola DEKRANASDA; pelatihan dan inovasi kerajinan; serta pameran dan promosi produk;

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan antara lain :

- 1) Masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha sehingga ditemui adanya pemanfaatan peralatan industri kecil dan menengah belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Masih lemahnya koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan pelaku usaha.
- 3) Masih rendahnya kesadaran dan aspirasi masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga terutama berkaitan dengan sektor industri kecil dan menengah.
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan.
- 5) Masih terbatasnya alokasi dana yang tersedia untuk menunjang program/kegiatan yang ditetapkan.

Solusi yang dilakukan guna meminimalisir permasalahan diatas, antara lain :

- 1) Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dengan biaya yang murah disetiap dan antar desa/kelurahan/kecamatan dalam kabupaten



Tanjung Jabung Timur sehingga biaya produksi dan harga jual produk dapat ditekan.

- 2) Peningkatan kualitas SDM melalui diklat teknis dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha.
- 3) Peningkatan koordinasi antar dinas instansi yang baik dalam rangka pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha.
- 4) Terwujudnya kesadaran dan aspirasi masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Usaha kecil dan menengah merupakan bagian penting penyokong perekonomian satu daerah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) produk potensial dan potensial tahun 2014 ada 371 IKM potensial dan 3 industri menengah besar dengan nilai investasi sebesar Rp. 34.586.422.000,00; nilai produksi sebesar Rp. 162.151.202.000,00; serta nilai bahan baku sebesar Rp. 25.938.408.000,00.

**Tabel 4.78**  
Perkembangan Industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH INDUSTRI	JUMLAH TENAGA KERJA	2014		
				NILAI INVESTASI (Rp)	NILAI PRODUKSI (Rp)	NILAI BAHAN BAKU (Rp)
1	IKM produk potensial	52	323	1.045.000.000	2.410.000.000	645.680.000
2	IKM potensial	319	879	12.837.400.000	6.701.502.000	6.477.198.000
3	Industri Menengah Besar	3	363	20.704.022.000	153.039.700.000	18.815.530.000
<b>JUMLAH</b>		<b>374</b>	<b>1.565</b>	<b>34.586.422.000</b>	<b>162.151.202.000</b>	<b>25.938.408.000</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur

Perdagangan lokal juga berkembang cukup pesat, setidaknya telah muncul beberapa minimarket dan pertokoan di beberapa kecamatan. Pasar tradisional yang sudah ada terus berkembang, pada tahun 2014 jumlah pasar sebanyak 26 unit yang terdiri dari 23 pasar mingguan dan 3 pasar harian, dari sisi kepemilikan 4 pasar merupakan milik masyarakat, 17 pasar merupakan milik pemda dan 5 pasar merupakan milik desa. Dari ke 24 pasar yang ada : 10 unit dalam kondisi baik, 1 unit dalam kondisi sedang dan 15 unit dalam kondisi kurang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.79 dibawah ini.



**Tabel 4.79**  
Perkembangan Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah pasar (Unit)	Kondisi (Unit)			Jenis Pasar (Unit)		Kepemilikan (Unit)		
		Baik	Sedang	kurang	Mingguan	Harian	Masyarakat	Pemda	Desa
2011	23				17	6	7	11	5
2012	24	10	1	13	21	3	4	17	3
2013	24	10	1	13	21	3	4	17	3
2014	26	10	1	15	23	3	4	17	5

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur